Algoritma, Disinformasi, dan Polarisasi Politik di Era AI

Algoritma mengatur keterlihatan

Konten emosional menarik perhatian

Disinformasi mudah beredar

Jarak dan ketidakpercayaan dapat menguat



MEKANISME

- Pemeringkatan & rekomendasi
- Ekonomi perhatian
- Jaringan dan identitas
- AI generatif

RISIKO

- Klaim palsu
- Konsensus semu
- Polarisasi afektif
- Turunnya kepercayaan

RESPONS DEMOKRATIS

- Transparansi & audit
- Jurnalisme dan cek fakta
- Literasi digital
- Moderasi yang adil

Algoritma dapat memperbesar pengaruh, tetapi polarisasi tidak terjadi secara otomatis.

Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | www.rudyct.com/cv.pdf | IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Algoritma, Disinformasi, dan Polarisasi Politik di Era AI

Artikel Akademik

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan antara algoritma platform digital, disinformasi, dan polarisasi politik di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), terutama AI generatif. Ketiganya sering diperlakukan sebagai satu rangkaian sebab-akibat yang sederhana: algoritma dianggap menciptakan ruang gema, ruang gema menyebarkan informasi palsu, lalu informasi palsu memecah masyarakat. Literatur menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Sistem rekomendasi mengatur keterlihatan dan insentif perhatian, tetapi pengguna, aktor politik, media, struktur sosial, dan model bisnis turut menentukan pola paparan. Disinformasi dapat memanfaatkan emosi, identitas, koordinasi jaringan, dan ketidakpercayaan yang sudah ada. Polarisasi sendiri mencakup dimensi ideologis, afektif, persepsi jarak, dan pengelompokan sosial yang tidak selalu bergerak searah. Artikel konseptual ini menguraikan mekanisme tersebut, menilai bukti empiris yang mendukung dan yang membatasi klaim kausal, serta mengontekstualisasikannya untuk Indonesia yang berciri pluralitas bahasa, kompetisi elektoral intensif, penggunaan platform yang luas, dan kesenjangan digital. AI generatif menurunkan biaya pembuatan variasi pesan dan konten sintetis, tetapi dampaknya bergantung pada distribusi, kredibilitas sumber, penerimaan audiens, dan respons institusi. Artikel mengusulkan tata kelola yang menggabungkan transparansi rekomendasi dan iklan politik, akses riset yang aman, moderasi yang dapat diajukan banding, penguatan jurnalisme dan literasi, serta pemantauan polarisasi yang membedakan konflik demokratis dari permusuhan antarkelompok. Kesimpulan utamanya: persoalan demokratis bukan semata keberadaan algoritma atau perbedaan pendapat, melainkan ketika infrastruktur informasi membuat manipulasi murah, dampak kekuasaan tidak terlihat, dan warga kehilangan kemampuan bersama untuk memeriksa klaim serta memperbaiki kesalahpahaman.

Kata Kunci

algoritma; disinformasi; polarisasi politik; kecerdasan buatan; AI generatif; media sosial; ruang publik; demokrasi; Indonesia; tata kelola platform

Pendahuluan

Dalam perdebatan politik mutakhir, algoritma kerap digambarkan sebagai mesin yang mengurung setiap orang dalam gelembung informasi, sementara AI generatif

disebut akan membanjiri ruang publik dengan kebohongan yang dapat dipercaya. Gambaran itu menangkap risiko nyata, tetapi bila diterima tanpa penjelasan mekanisme, ia mengaburkan perbedaan antara seleksi konten, perilaku pengguna, propaganda terkoordinasi, dan perubahan sikap politik. Artikel ini mengajukan pendekatan yang lebih terurai: algoritma membentuk kondisi paparan dan insentif; disinformasi merupakan praktik yang melibatkan niat, isi, sumber, dan jaringan; polarisasi adalah hasil sosial-politik yang memiliki beberapa dimensi dan penyebab. Hubungan di antara ketiganya harus diuji, bukan diasumsikan.

Yang dimaksud algoritma dalam tulisan ini ialah prosedur komputasional yang memilih, mengurutkan, merekomendasikan, atau memoderasi konten berdasarkan sinyal tertentu. Sistem rekomendasi modern dapat menggunakan pembelajaran mesin, tetapi aturan berbasis skor, moderasi otomatis, dan pemeringkatan juga termasuk dalam ekosistem algoritmik. Disinformasi dibedakan dari misinformasi—informasi keliru yang beredar tanpa niat menipu—serta malinformasi, yakni informasi yang benar tetapi digunakan dalam konteks yang merugikan. Polarisasi dibahas sebagai jarak sikap, permusuhan afektif, pemisahan jaringan, atau persepsi bahwa kubu politik tidak dapat hidup bersama. Pembedaan istilah ini membantu mencegah diagnosis yang menyederhanakan persoalan.

Kajian ini bersifat naratif-konseptual, bukan laporan survei atau eksperimen baru. Literatur internasional menyediakan temuan eksperimental dan observasional, tetapi banyak berasal dari Amerika Serikat atau platform tertentu. Hasilnya tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Sejumlah penelitian Indonesia mengenai pemilu 2019 dan 2024 mendokumentasikan disinformasi, konflik narasi, dan penggunaan media sosial; temuan tersebut memberi konteks, tetapi tidak serta-merta mengukur efek kausal algoritma pada sikap atau pilihan pemilih. Karena itu, artikel ini menyatakan batas bukti dengan terang dan menggunakan kasus Indonesia sebagai konteks analitis, bukan sebagai klaim kuantitatif nasional.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa algoritma dan AI dapat memperbesar kapasitas untuk membentuk perhatian, memproduksi pesan, dan mengoordinasikan pengaruh, tetapi keduanya tidak secara otomatis menghasilkan polarisasi. Pengaruh muncul melalui interaksi teknologi dengan insentif ekonomi, strategi elite, identitas kelompok, kualitas media, literasi, dan kepercayaan pada institusi. Tugas kebijakan bukan menyensor perbedaan politik atau menganggap setiap rekomendasi sebagai ancaman, melainkan membuat

proses pengaruh dapat dilihat, mengurangi penyalahgunaan, memperkuat kemampuan verifikasi, dan mempertahankan ruang untuk konflik politik yang sah.

1. Memahami polarisasi politik secara lebih tepat

Polarisasi politik bukan satu keadaan tunggal. Ia dapat berarti jarak yang makin jauh antara posisi kebijakan, pembentukan kubu yang stabil, ketidakpercayaan terhadap lawan politik, atau keyakinan bahwa kelompok lain tidak sah mewakili warga. Perbedaan ini penting karena penyebab dan akibatnya tidak selalu sama. Masyarakat dapat berbeda tajam tentang pajak, lingkungan, atau pemerataan tanpa saling membenci. Sebaliknya, warga dapat memiliki pandangan kebijakan yang relatif berdekatan tetapi tetap menolak kelompok lain karena identitas, stereotip, atau kecurigaan terhadap niat mereka. Pembahasan polarisasi harus menyebut dimensi yang sedang dinilai.

Polarisasi ideologis mengacu pada jarak substantif antarposisi. Dalam demokrasi, sebagian jarak merupakan konsekuensi kompetisi dan pilihan nilai. Konflik terbuka dapat membantu warga membedakan program dan meminta pertanggungjawaban. Masalah timbul ketika posisi menjadi tak terdamaikan, kompromi dianggap pengkhianatan, atau kelompok politik menolak legitimasi aturan yang memungkinkan pergantian kekuasaan. Polarisasi afektif berbeda: ia menyangkut emosi terhadap kubu lain, termasuk rasa jijik, takut, atau kebencian. Pengukuran opini kebijakan saja tidak menangkap dimensi afektif tersebut.

Polarisasi sosial muncul ketika batas politik bertumpuk dengan identitas agama, etnis, kelas, wilayah, atau gaya hidup. Ketika identitas-identitas ini saling menguatkan, perselisihan kebijakan mudah dipahami sebagai ancaman terhadap keseluruhan cara hidup suatu kelompok. Dalam keadaan demikian, koreksi faktual saja dapat tidak memadai karena pertikaian menyangkut rasa aman, pengakuan, dan status. Media digital dapat membuat identitas lebih tampak dan lebih mudah dimobilisasi, tetapi akar konflik biasanya berada dalam sejarah, ketimpangan, institusi, dan strategi elite yang lebih panjang.

Istilah polarisasi juga sering dipakai untuk menggambarkan persepsi publik. Warga dapat melebih-lebihkan ekstremisme lawan, mengira bahwa seluruh pendukung kelompok lain memiliki posisi yang sama, atau menyimpulkan bahwa

suatu konten mencerminkan sikap mayoritas. Persepsi semacam itu penting karena dapat memicu respons defensif, meskipun jarak aktual tidak terlalu besar. Ruang media yang menonjolkan konflik membuat contoh paling provokatif tampak lebih representatif daripada kenyataannya. Karena itu, survei perlu membedakan posisi pribadi, persepsi terhadap lawan, dan dugaan tentang pendapat masyarakat secara keseluruhan.

Literatur tentang demokrasi mengingatkan bahwa polarisasi dapat membawa konsekuensi positif maupun merusak. Konflik yang terlembaga membantu artikulasi kepentingan, sementara permusuhan yang menghapus legitimasi lawan dapat melemahkan kerja sama dan penerimaan terhadap aturan. Artikel ini menggunakan istilah polarisasi secara spesifik dan tidak menyamakan perbedaan pendapat dengan disintegrasi. Penggunaan istilah yang longgar dapat memicu diagnosis berlebihan dan mendorong sensor terhadap kritik. Tantangan tata kelola ialah melindungi pluralisme sekaligus mengurangi praktik yang memelihara kebencian, intimidasi, dan misinformasi.

2. Algoritma sebagai pengatur keterlihatan

Algoritma platform menentukan urutan konten, rekomendasi, hasil pencarian, dan interaksi yang diberi peringkat. Pengguna tidak selalu melihat seluruh konten yang tersedia dari jaringan mereka. Sistem memilih berdasarkan perkiraan relevansi atau keterlibatan, menggunakan sinyal seperti hubungan antar akun, riwayat interaksi, topik, kebaruan, serta format. Pilihan teknis tersebut memengaruhi apa yang terlihat dan kapan. Oleh sebab itu, algoritma menjadi bagian dari infrastruktur politik: ia mengatur keterlihatan isu, kandidat, saksi, koreksi, dan suara minoritas meskipun tidak secara resmi menetapkan agenda politik.

Pemeringkatan merupakan bentuk kuasa yang tidak selalu tampak. Konten yang tidak dihapus tetapi dikurangi jangkauannya tetap kehilangan peluang untuk ditemukan. Konten yang direkomendasikan berulang dapat tampak penting karena banyak orang membicarakannya, sekalipun jangkauan awalnya dibentuk oleh sistem. Perbedaan antara ketersediaan dan keterlihatan membantu menjelaskan mengapa akses formal ke platform belum tentu setara dengan kesempatan berbicara. Pengguna dapat mengunggah pesan, tetapi tidak mengetahui aturan yang menentukan apakah pesan itu mencapai audiens.

Sistem rekomendasi belajar dari perilaku yang dapat diamati, tetapi sinyal tersebut tidak identik dengan preferensi politik. Klik dapat berarti dukungan, rasa ingin tahu, kemarahan, atau keinginan memeriksa klaim. Durasi menonton tidak menunjukkan persetujuan. Jika sistem membaca interaksi sebagai tanda minat, konten yang memancing reaksi mungkin diberi bobot lebih besar daripada penjelasan yang tenang. Ini tidak berarti algoritma sengaja mempromosikan ekstremisme. Ia menunjukkan bagaimana ukuran operasional dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak direncanakan ketika perhatian digunakan sebagai proksi nilai konten.

Rancangan rekomendasi juga mencerminkan pilihan tentang tujuan. Apakah sistem mengoptimalkan waktu pakai, kepuasan pengguna, relevansi, keragaman sumber, atau kualitas informasi? Tujuan ini dapat bersaing. Sistem yang memaksimalkan kepuasan jangka pendek mungkin menghindari konten yang menantang; sistem yang memperluas keragaman tanpa konteks dapat menampilkan materi ekstrem untuk meningkatkan interaksi. Menilai platform hanya dari pernyataan bahwa algoritma "membantu pengguna menemukan konten" mengabaikan pertanyaan tentang metrik, bobot, dan konsekuensi sosial dari penemuan tersebut.

Mekanisme algoritmik berbeda di setiap layanan, berkembang dari waktu ke waktu, dan dipengaruhi pengaturan pengguna. Sebuah temuan pada Facebook pada satu periode tidak otomatis menjelaskan TikTok, YouTube, Instagram, X, mesin pencari, atau aplikasi pesan. Analisis yang bertanggung jawab mencatat platform, populasi, periode, definisi paparan, dan ukuran hasil. Keterbukaan ini sangat penting karena istilah "algoritma media sosial" sering menutupi perbedaan besar antara sistem rekomendasi video, kronologi jaringan pertemanan, pencarian, moderasi, dan iklan.

3. Model bisnis perhatian dan insentif keterlibatan

Banyak platform memperoleh pendapatan dari iklan dan waktu perhatian. Model bisnis ini mendorong pengukuran atas klik, tayangan, komentar, pembagian, dan durasi penggunaan. Metrik keterlibatan dapat membantu mengidentifikasi materi yang dianggap menarik, tetapi tidak mengukur kebenaran atau manfaat publik. Ketika kemarahan dan kejutan menghasilkan respons lebih besar, konten

provokatif mendapat keunggulan distributif. Hubungan ini bersifat struktural: ia dapat terjadi tanpa koordinasi politik langsung dan tanpa niat platform memihak satu kubu tertentu.

Ekonomi perhatian mengubah biaya komunikasi politik. Aktor yang mampu memproduksi banyak konten, menguji variasi, dan memantau respons dapat mengoptimalkan kampanye dengan cepat. Kelompok warga, jurnalis, dan peneliti sering tidak memiliki sumber daya yang setara untuk memeriksa pesan. AI generatif mempercepat produksi variasi dan menurunkan hambatan pembuatan konten, sementara sistem rekomendasi membantu mengarahkan perhatian. Gabungan ini dapat membuat strategi yang berorientasi pada keterlibatan lebih murah, tetapi tidak menjamin bahwa konten tersebut akan dipercaya atau memengaruhi pilihan.

Insentif keterlibatan dapat memperbesar konflik ketika format platform memberi penghargaan pada reaksi cepat. Unggahan pendek, judul provokatif, klip tanpa konteks, dan komentar bernada menyerang mudah mendorong respons instan. Materi yang kompleks membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipahami. Jika algoritma dan kebiasaan pengguna sama-sama mengutamakan kecepatan, penjelasan korektif dapat datang setelah narasi emosional terlanjur tertanam. Namun mekanisme ini harus dibuktikan pada konteks tertentu; tidak semua konten viral bersifat ekstrem, dan tidak semua konten yang memicu emosi merusak deliberasi.

Perusahaan dapat merancang metrik yang tidak hanya mengejar keterlibatan. Misalnya, kualitas sumber, keberagaman perspektif, pengalaman pengguna setelah membaca, atau kecenderungan menyimpan informasi sebagai rujukan dapat dipertimbangkan. Mengubah tujuan bukan pekerjaan sederhana karena ukuran baru dapat dimanipulasi dan mungkin mengurangi pendapatan. Akan tetapi, keberatan bisnis tidak menghapus tanggung jawab platform yang telah menjadi infrastruktur komunikasi politik. Keterbukaan tentang tujuan optimasi memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan menilai konsekuensinya.

Persoalan model bisnis berkaitan pula dengan konsentrasi pasar. Ketika sebagian besar percakapan politik berlangsung di beberapa platform, keputusan internal yang tidak transparan dapat memengaruhi banyak warga sekaligus. Dominasi tersebut memberi perusahaan daya besar untuk menetapkan syarat partisipasi dan moderasi. Pilihan regulasi perlu mempertimbangkan persaingan, portabilitas,

interoperabilitas, dan akses audit. Kebijakan tidak hanya mengatur satu unggahan atau satu pelaku, tetapi juga kondisi struktural yang membuat insentif platform dapat menentukan kualitas ruang publik.

4. Gelembung filter dan ruang gema: istilah yang perlu dibedakan

Gelembung filter menggambarkan keadaan ketika personalisasi secara konsisten membatasi paparan seseorang pada informasi berbeda. Ruang gema lebih menekankan dinamika sosial: pesan dalam kelompok diulang, diperkuat, dan dibenarkan oleh anggota yang saling percaya, sementara sumber luar dianggap tidak kredibel. Keduanya dapat beririsan, tetapi bukan sinonim. Filter dapat terjadi karena pemeringkatan individual, sedangkan echo chamber dapat terbentuk melalui pilihan jaringan dan norma komunitas sekalipun tidak ada personalisasi algoritmik.

Perdebatan publik sering mengasumsikan bahwa semua pengguna hidup dalam ruang gema yang tertutup. Tinjauan lintas negara menemukan bahwa diet berita banyak orang cukup beragam dan seleksi algoritmik kadang memperluas paparan dibanding pilihan mandiri yang sempit. Pada saat yang sama, minoritas yang sangat partisan dapat memilih sumber searah dan berpengaruh pada wacana. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko nyata tidak selalu berupa gelembung universal. Ia dapat berpusat pada kelompok kecil yang aktif, jaringan privat, atau momen ketika isu identitas memuncak.

Keragaman paparan tidak selalu menurunkan polarisasi. Warga dapat melihat pandangan berbeda tetapi menafsirkannya sebagai ancaman, manipulasi, atau bukti keburukan lawan. Sebaliknya, paparan terhadap kesamaan pendapat dapat memberi rasa dukungan sosial tanpa menjadikan orang lebih ekstrem. Hubungan antara paparan dan perubahan sikap bergantung pada cara konten dibingkai, reputasi sumber, pengalaman sebelumnya, dan norma kelompok. Oleh sebab itu, menghitung berapa banyak sumber berbeda yang terlihat bukan satu-satunya ukuran kualitas informasi.

Algoritma dapat mengubah komposisi paparan tanpa menciptakan isolasi total. Konten dari luar lingkaran pertemanan dapat muncul melalui rekomendasi, tren, atau iklan. Sebagian paparan tidak disengaja, sedangkan sebagian lain berasal dari pencarian aktif. Studi Bakshy, Messing, dan Adamic (2015) menunjukkan bahwa

baik pilihan individu maupun peringkat algoritmik memengaruhi paparan berita ideologis pada Facebook, dengan peran seleksi pribadi yang besar. Temuan tersebut tidak boleh digeneralisasikan tanpa memperhatikan periode, pengguna, dan platform yang diteliti.

Penerapan kebijakan yang berasumsi semua pengguna terperangkap dalam gelembung dapat menjadi tidak efektif. Mendorong keragaman sumber mungkin tidak menyelesaikan masalah apabila warga tidak percaya pada lembaga, atau apabila pesan berbeda disampaikan secara menghina. Intervensi lebih baik menguji hambatan yang spesifik: apakah rekomendasi membatasi sumber, apakah grup menolak koreksi, apakah iklan tidak transparan, atau apakah warga kekurangan akses pada berita lokal. Diagnosis terpilah memungkinkan respons yang tepat dan menghindari narasi ketakutan yang terlalu menyederhanakan.

5. Jaringan sosial, homofili, dan dinamika kelompok

Jaringan sosial sering menunjukkan homofili, yaitu kecenderungan orang berhubungan dengan mereka yang serupa dalam keyakinan, minat, atau latar sosial. Pola ini tidak selalu dipaksakan oleh rekomendasi. Warga memilih teman, mengikuti tokoh, bergabung dengan grup, dan menghindari percakapan yang tidak nyaman. Platform dapat memperkuat pilihan tersebut dengan menyarankan akun yang berkaitan atau menonjolkan komunitas yang aktif. Akibatnya, jejaring politik terbentuk dari interaksi antara desain sistem dan keputusan sosial yang sudah berlangsung di luar platform.

Dalam jaringan yang terklaster, informasi dapat bergerak cepat di dalam komunitas dan lambat menyeberang antarkomunitas. Struktur tersebut membantu anggota menyebarkan berita lokal dan mengorganisasi kegiatan, tetapi juga dapat memperkuat konsensus internal. Jika informasi palsu menyentuh identitas kelompok, koreksi dari pihak luar mungkin dianggap sebagai serangan. Hubungan kepercayaan memengaruhi kredibilitas lebih kuat daripada format konten semata. Untuk itu, strategi koreksi perlu memahami siapa yang dihormati dalam komunitas dan bagaimana pesan disampaikan.

Polarisasi jaringan dapat diukur melalui kesamaan pilihan sumber, keterhubungan antarkelompok, atau pola pembagian konten. Tetapi ukuran jaringan tidak sama dengan perubahan sikap. Klaster yang padat dapat menunjukkan kedekatan interaksi, bukan permusuhan. Sebaliknya, jaringan yang

relatif bercampur dapat tetap menyimpan polarisasi afektif tinggi. Penelitian perlu menggabungkan analisis jaringan dengan survei, wawancara, dan data perilaku agar indikator teknis tidak disalahartikan sebagai bukti konflik sosial.

Grup pesan tertutup memberi konteks khusus. Komunikasi di dalamnya sering mengandalkan relasi nyata, sehingga pesan dari kerabat atau kolega dapat dipercaya lebih cepat daripada berita dari media. Enkripsi dan privasi merupakan kepentingan sah, tetapi fitur penerusan massal dan ukuran grup dapat mempercepat rumor. Solusi tidak boleh berupa pemantauan umum percakapan privat. Platform dapat membatasi penerusan berulang, memberi konteks untuk pesan yang diteruskan, menyediakan kanal pelaporan sukarela, dan mengarahkan warga ke informasi resmi tanpa membaca isi pesan secara menyeluruh.

Dinamika kelompok menjelaskan mengapa koreksi faktual kadang tidak mengubah keyakinan. Anggota komunitas dapat menghadapi tekanan sosial untuk mempertahankan narasi bersama. Mengubah pendapat bisa dipersepsikan sebagai kehilangan status atau loyalitas. Intervensi yang hanya mengirim tautan bantahan mengabaikan biaya sosial tersebut. Dialog yang dipandu fasilitator tepercaya, kesempatan mengajukan pertanyaan tanpa dipermalukan, dan pengakuan atas ketidakpastian dapat membuka ruang revisi. Pendekatan ini membutuhkan waktu dan tidak bisa digantikan oleh moderasi otomatis.

6. Ekologi disinformasi dan pelaku yang terlibat

Disinformasi memiliki ekologi produksi dan distribusi. Pelaku dapat mencakup aktor politik, konsultan, jaringan akun berkoordinasi, media partisan, influencer, kelompok kepentingan, hingga pengguna biasa yang membagikan klaim tanpa memeriksa. Tidak semua konten keliru merupakan operasi terorganisasi dan tidak semua akun anonim adalah bot. Penelusuran sumber perlu membedakan niat, pembuat awal, pihak yang mengemas ulang, jaringan distribusi, serta audiens yang menyebarkan. Pembedaan itu penting untuk memilih respons yang tidak menghukum pengguna biasa karena salah memahami informasi.

Operasi pengaruh dapat menggunakan beberapa tahap: menentukan narasi, menghasilkan pesan, membuat sumber tampak kredibel, menyebarkan melalui jaringan, mengamati respons, dan menyesuaikan variasi. Tujuannya dapat berupa mendukung kandidat, merusak reputasi lawan, menurunkan partisipasi,

memperuncing isu, atau menimbulkan ketidakpercayaan pada prosedur. Keberhasilan tidak selalu diukur dari perubahan suara. Memecah perhatian, melemahkan legitimasi media, atau membuat publik merasa bahwa semua pihak berbohong juga dapat menjadi sasaran strategis.

Teknik distribusi mencakup akun palsu, bot, koordinasi sukarela, pembelian iklan, penciptaan tren, dan pemindahan konten lintas platform. Dalam beberapa operasi, akun otomatis hanya menjadi pemicu awal; manusia dan jaringan relawan melanjutkan penyebaran. Kajian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menemukan bahwa pada data Twitter yang mereka analisis, berita palsu menyebar lebih jauh dan cepat daripada berita benar, sementara bot mempercepat keduanya secara serupa. Temuan itu menyoroti peran perilaku manusia, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap platform atau rumor politik mengikuti pola yang sama.

Identifikasi bot memerlukan kehati-hatian. Otomatisasi dapat dilakukan oleh akun yang juga memiliki operator manusia, sedangkan pengguna aktif dapat menghasilkan pola frekuensi tinggi yang tampak otomatis. Label “bot” dapat menjadi senjata retoris untuk mendiskreditkan lawan. Sistem deteksi yang salah dapat menutup suara aktivis atau warga yang memakai alat bantu. Penilaian sebaiknya menggabungkan indikator perilaku, jaringan, waktu, dan koordinasi, serta menyatakan tingkat ketidakpastian. Tindakan penegakan yang berdampak pada akun perlu menyediakan alasan dan mekanisme banding.

Sumber disinformasi tidak selalu berasal dari luar negeri. Narasi dapat dibangun oleh aktor domestik yang memahami bahasa, isu, dan simbol lokal. Mencari campur tangan asing sebagai penjelasan tunggal berisiko mengalihkan perhatian dari insentif politik lokal, media partisan, dan ekosistem kepercayaan. Operasi lintas batas tetap relevan, tetapi analisis harus berbasis bukti tentang keterhubungan, pendanaan, koordinasi, serta asal akun. Menyebut suatu kampanye sebagai operasi asing tanpa dasar kuat dapat memperburuk kecurigaan dan mengurangi kredibilitas lembaga.

7. Bagaimana informasi menyesatkan menyebar

Penyebaran informasi dipengaruhi oleh kebaruan, emosi, keterkejutan, kesesuaian identitas, dan jaringan sosial. Klaim yang mengejutkan dapat dibagikan sebelum diperiksa karena pengguna ingin memberi tahu orang lain atau menunjukkan posisi moral. Narasi yang menyalahkan kelompok luar terasa

relevan bagi identitas dan menyediakan penjelasan sederhana atas masalah rumit. Algoritma dapat mempercepat distribusi ketika interaksi tinggi, tetapi motivasi manusia tetap memainkan peran penting. Karena itu, solusi teknis yang hanya menghapus bot tidak akan menghentikan penyebaran oleh manusia yang percaya atau memperoleh manfaat sosial dari klaim tersebut.

Konten biasanya bergerak melalui rangkaian transformasi. Sebuah potongan video diberi judul baru; unggahan menjadi tangkapan layar; tangkapan layar dipindahkan ke aplikasi pesan; kemudian narasi disajikan tanpa tautan ke sumber asli. Setiap perubahan dapat menghapus konteks dan menambah interpretasi. Pemeriksaan fakta yang hanya mengevaluasi unggahan pertama mungkin gagal menangani versi turunan. Dokumentasi asal konten, tanggal, pemotongan, terjemahan, serta jaringan penyebaran membantu memahami bagaimana makna berubah.

Pengulangan menimbulkan efek familiaritas: klaim yang sering terlihat dapat terasa lebih benar walaupun tidak ada bukti baru. Sistem rekomendasi dan jaringan komunitas dapat menciptakan pengulangan tersebut secara berbeda. Koreksi yang mengulang klaim palsu berulang kali berisiko menambah familiaritasnya. Karena itu, klarifikasi sebaiknya mengedepankan fakta yang benar, menyebut klaim seperlunya, dan menghubungkannya dengan sumber primer. Penempatan koreksi dekat dengan konten asal dapat membantu, tetapi hasilnya perlu diuji pada perilaku pengguna.

Kecepatan penyebaran membuat waktu respons menjadi variabel penting. Namun respons yang terlalu cepat dapat menyiarkan dugaan yang belum diverifikasi dan memberi kesan bahwa lembaga menyembunyikan sesuatu. Protokol yang baik menetapkan tahap triase: simpan bukti, verifikasi sumber, klasifikasikan tingkat risiko, hubungi pihak terkait, lalu komunikasikan apa yang sudah diketahui dan belum diketahui. Pernyataan ketidakpastian yang jujur sering lebih kredibel daripada kepastian prematur yang kemudian harus ditarik.

Pengukuran viralitas harus dibedakan dari dampak politik. Banyak tayangan tidak otomatis berarti banyak orang percaya. Komentar dapat menunjukkan penolakan atau ejekan. Pembagian dapat dilakukan untuk mengkritik, mengarsipkan, atau meminta klarifikasi. Efek dapat berlangsung melalui agenda, reputasi, ketidakpastian, atau demobilisasi tanpa mengubah sikap secara langsung.

Penelitian perlu mengamati beberapa hasil, seperti ingatan, keyakinan, niat, kepercayaan, dan perilaku, serta menghindari klaim bahwa satu indikator mewakili seluruh konsekuensi.

8. Psikologi informasi dan penerimaan klaim

Penerimaan informasi tidak ditentukan oleh rendahnya kecerdasan atau minimnya pendidikan semata. Orang menggunakan perhatian terbatas, heuristik, pengalaman, dan kepercayaan pada sumber. Mereka dapat menerima klaim karena terasa masuk akal, sesuai dengan pengalaman, atau dibagikan oleh orang yang mereka kenal. Sebaliknya, warga dengan pendidikan tinggi juga dapat terpengaruh ketika pesan sesuai identitas politik. Kajian psikologi berita palsu menekankan bahwa perhatian pada akurasi, penalaran, dan lingkungan distribusi perlu dibahas bersama motivasi kelompok (Pennycook & Rand, 2021).

Bias konfirmasi sering dipakai untuk menjelaskan kepercayaan pada disinformasi, tetapi penjelasan tunggal ini tidak memadai. Sebagian orang membagikan konten karena tidak berhenti untuk memeriksa akurasi, bukan karena sengaja mendukung kepalsuan. Eksperimen yang mengarahkan perhatian pada akurasi dapat meningkatkan kualitas keputusan berbagi dalam beberapa konteks. Namun intervensi tersebut bukan obat universal; tekanan waktu, norma kelompok, sumber yang dipercaya, dan tujuan komunikasi memengaruhi hasil. Desain kebijakan perlu membedakan ketidakmampuan memeriksa dari motivasi untuk menyebarkan klaim tertentu.

Emosi merupakan komponen penting penilaian. Ketakutan dapat membuat ancaman tampak lebih mungkin, sementara kemarahan mendorong pembalasan atau penyebaran cepat. Humor dan satire dapat memudahkan penerimaan gagasan serta mengaburkan apakah pesan dimaksudkan secara literal. AI generatif memudahkan pembuatan variasi pesan dengan nada tertentu, tetapi tidak berarti model mengetahui keadaan psikologis setiap individu secara sempurna. Kemampuan persuasi perlu dievaluasi melalui riset, bukan diasumsikan dari kecanggihan teknologi atau dari contoh konten yang paling viral.

Koreksi fakta kadang memperbarui ingatan tentang klaim tetapi tidak langsung mengubah penilaian politik. Ini dapat terjadi karena sumber koreksi tidak dipercaya, bukti baru tidak menyentuh nilai yang dipersoalkan, atau pengakuan kesalahan terlalu mahal secara sosial. Koreksi yang efektif memberi penjelasan

alternatif yang koheren, mengidentifikasi sumber bukti, dan menghindari penghinaan terhadap orang yang sempat percaya. Pengakuan terhadap ketidakpastian atau kesalahan institusi juga penting agar koreksi tidak tampak sebagai propaganda tandingan.

Literasi digital yang hanya mengajarkan daftar ciri hoaks dapat cepat usang. Teknik manipulasi berubah; konten palsu bisa tampak rapi, sementara konten autentik dapat diberi konteks palsu. Pendekatan yang lebih kuat melatih kebiasaan lateral reading: memeriksa sumber lain, mencari asal gambar, membaca konteks publikasi, dan membandingkan klaim dengan dokumen primer. Pendidikan juga perlu membahas alasan membagikan informasi dan konsekuensi sosial dari penyebaran. Tujuannya bukan membuat warga curiga pada semua hal, melainkan membangun sikap terbuka yang disertai pemeriksaan.

9. Polarisasi afektif, identitas, dan politik emosi

Polarisasi afektif terjadi ketika ketidaksukaan terhadap kubu lain menjadi bagian penting dari identitas politik. Warga dapat menilai lawan tidak hanya salah tentang kebijakan, tetapi juga tidak bermoral, tidak patriotik, atau berbahaya bagi masyarakat. Ketika identitas partisan berkelindan dengan agama, etnis, wilayah, atau status sosial, konflik mudah meluas dari isu tertentu menjadi penilaian atas seluruh kelompok. Media sosial memberi sarana untuk menyatakan afiliasi, membalas lawan, dan menerima pengakuan dari kelompok sendiri, sehingga emosi memperoleh bentuk yang terlihat serta terukur.

Konten emosional dapat berfungsi sebagai sinyal identitas. Pengguna membagikan meme atau video bukan selalu karena percaya setiap detail, tetapi untuk menunjukkan keberpihakan, humor bersama, atau kecaman moral. Penonton luar mungkin menafsirkan konten itu sebagai pernyataan literal. Perbedaan tafsir ini menciptakan salah paham dan memperkuat stereotip. Analisis polarisasi perlu menilai fungsi sosial konten, jaringan penyebar, dan tanggapan audiens, bukan hanya memeriksa benar-salah proposisi yang terkandung di dalamnya.

Elite politik dapat memperbesar perpecahan dengan menggambarkan persaingan sebagai pertarungan eksistensial. Narasi ancaman membuat dukungan pada kompromi tampak sebagai pengkhianatan. Platform menyediakan panggung dan

data tentang reaksi, tetapi elite tetap memilih isu, bahasa, dan sasaran mobilisasi. Jika pemimpin terus menggunakan label yang merendahkan, rekomendasi algoritmik bukan penyebab utama permusuhan. Namun amplifikasi dapat memperluas jangkauan dan memberi insentif untuk terus menggunakan strategi tersebut. Tanggung jawab karena itu berada pada aktor politik dan infrastruktur distribusi secara bersamaan.

Permusuhan afektif dapat bertahan meskipun posisi kebijakan tidak semakin jauh. Warga mungkin menolak kandidat lawan karena menganggapnya bagian dari kelompok yang mengancam, bukan karena memahami programnya. Dalam kondisi ini, menyajikan lebih banyak argumen teknis tidak selalu memulihkan hubungan. Intervensi dapat menekankan tujuan bersama, pengalaman lintas kelompok, dan norma kompetisi yang mengakui hak lawan untuk berpartisipasi. Dialog tidak berarti menghapus konflik; ia membantu mencegah perbedaan berubah menjadi penolakan atas kemanusiaan atau legitimasi orang lain.

Pengukuran sikap terhadap kelompok lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Pertanyaan survei dapat mencerminkan suasana sesaat, efek pertanyaan, dan keterbatasan representasi. Sentimen dalam unggahan bukan pengganti survei sikap; pengguna yang memposting politik sangat aktif tidak mewakili seluruh masyarakat. Analisis teks otomatis juga berisiko salah memahami bahasa sindiran, slang, dialek, dan ungkapan lokal. Data sebaiknya digunakan dengan batas klaim yang jelas dan dibandingkan dengan sumber bukti lain sebelum menyimpulkan tingkat polarisasi.

10. Algoritma dan proses agenda publik

Agenda publik dibentuk oleh proses berulang: isu dinyatakan, diberi bingkai, memperoleh perhatian, diperdebatkan, lalu dikaitkan dengan tanggung jawab politik. Algoritma memengaruhi tahap perhatian dengan menentukan apa yang muncul kepada pengguna, tetapi aktor berita, pemimpin, organisasi warga, serta peristiwa nyata turut memberi arah. Satu isu dapat menjadi viral karena terjadi kejadian besar, bukan semata karena sistem menonjolkannya. Penelitian harus memisahkan faktor pemicu, mekanisme distribusi, dan respons audiens agar peran algoritma tidak dibesar-besarkan.

Platform dapat membuat isu tertentu tampak dominan karena indikator keterlibatan yang terlihat. Jumlah suka, komentar, dan pembagian memberi kesan

bahwa sebuah topik penting bagi semua orang. Padahal metrik tersebut dapat berasal dari komunitas aktif yang relatif kecil. Persepsi dominasi dapat mendorong media dan politisi ikut merespons, sehingga terjadi umpan balik antara aktivitas online dan perhatian elite. Proses ini tidak selalu merugikan: kampanye warga juga dapat menggunakan visibilitas digital untuk mengangkat masalah yang sebelumnya diabaikan.

Bingkai isu memengaruhi interpretasi. Masalah ekonomi dapat dipresentasikan sebagai kegagalan kebijakan, ancaman moral, atau persaingan antaridentitas. Sistem rekomendasi dapat mengarahkan pengguna pada konten yang sejenis, tetapi bingkai awal sering dipilih oleh pembuat konten, pemimpin opini, atau organisasi politik. Konten yang mudah dibagikan cenderung menyederhanakan sebab dan solusi. Tanggung jawab media ialah mempertahankan konteks, menunjukkan sumber, serta memisahkan laporan faktual dari komentar dan kampanye.

Ekologi perhatian yang terfragmentasi membuat lembaga publik menghadapi audiens yang berbeda-beda. Klarifikasi di situs resmi mungkin tidak mencapai komunitas tempat rumor berkembang. Strategi komunikasi perlu menggunakan jaringan dan bahasa yang relevan, sambil tidak mengorbankan konsistensi fakta. Kerja sama dengan media lokal, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat dapat membantu menjangkau ruang yang tertutup. Penggunaan data untuk mengarahkan pesan harus transparan serta tidak berubah menjadi penargetan rahasia yang mengeksploitasi kerentanan individu.

Pengukuran agenda publik memerlukan data lintas saluran. Volume pencarian, pemberitaan media, tren platform, dan survei opini menggambarkan aspek yang berbeda. Tidak satu pun cukup untuk menyimpulkan bahwa “publik” sepakat atau terpolarisasi. Warga yang tidak aktif secara digital tetap memiliki pandangan, dan percakapan offline dapat mengubah makna isu. Lembaga riset perlu menjelaskan sumber data, populasi yang terwakili, serta keterbatasan akses platform ketika membuat klaim tentang perhatian publik.

11. Propaganda komputasional dan operasi pengaruh

Propaganda komputasional merupakan penggunaan otomatisasi, algoritma, data, dan kurasi manusia untuk membentuk percakapan atau opini. Konsep ini

menekankan kombinasi teknologi dengan strategi organisasi. Akun otomatis dapat membantu meningkatkan frekuensi, tetapi narasi yang efektif biasanya memerlukan pilihan tema, simbol, jaringan manusia, dan penyesuaian terhadap peristiwa. Kampanye pengaruh dapat berlangsung secara terbuka sebagai persuasi politik atau secara tersembunyi melalui penyamaran sumber dan penciptaan dukungan palsu. Perbedaan keterbukaan sumber merupakan faktor penting dalam menilai legitimasi praktik komunikasi.

Operasi pengaruh dapat mengejar tujuan yang berbeda: memobilisasi pendukung, mengintimidasi lawan, merusak kredibilitas institusi, atau memperbesar ketidakpastian. Tidak setiap kampanye terkoordinasi adalah disinformasi; organisasi politik memang mengoordinasikan pesan. Yang perlu dinilai ialah apakah identitas dan sponsor disamarkan, apakah informasi palsu disebarkan, apakah akun meniru warga independen, serta apakah praktik melanggar aturan. Pembedaan ini membantu menghindari pelabelan politik yang serampangan dan menempatkan bukti sebagai dasar respons.

Jaringan akun yang menyebarkan narasi serupa dapat dibentuk dari bot, akun manusia, jaringan relawan, atau kombinasi. Pola sinkronisasi, kemiripan konten, dan hubungan antar akun dapat menjadi petunjuk, tetapi bukan bukti tunggal koordinasi. Pengguna dapat menyalin meme populer secara organik; banyak organisasi juga menjadwalkan unggahan. Auditor memerlukan metode yang transparan, baseline pembanding, dan analisis alternatif. Kesimpulan harus menyatakan apakah bukti cukup untuk menyebut perilaku tidak autentik dan apa tingkat kepastiannya.

AI generatif dapat membantu operasi pengaruh menghasilkan persona, biografi, komentar, dan variasi konten dengan gaya berbeda. Namun penyamaran kredibel memerlukan konsistensi lintas waktu, jejaring, dan perilaku, bukan sekadar teks yang lancar. Sistem deteksi dapat menemukan anomali, tetapi pelaku dapat mengubah pola untuk menghindari deteksi. Karena itu, pertahanan sebaiknya tidak bergantung pada satu klasifikator. Pencatatan sponsor, audit iklan, pemeriksaan koordinasi, dan investigasi sumber dapat saling melengkapi.

Penyebutan “propaganda asing” harus berdasarkan bukti. Tuduhan tanpa bukti dapat memperburuk kecurigaan pada komunitas diaspora atau kritik domestik yang sah. Pemeriksaan perlu membedakan lokasi operator, pendanaan, hubungan organisasi, dan sasaran kampanye. Dalam banyak kasus, atribusi mungkin tidak

dapat dipastikan segera. Pengumuman publik sebaiknya menyatakan fakta yang telah terverifikasi dan menyebut bagian yang masih diselidiki. Ketelitian atribusi melindungi kredibilitas lembaga penanggulangan pengaruh.

12. Bot, akun sintetis, dan ilusi dukungan mayoritas

Bot politik sering dipandang sebagai penjelasan utama percakapan yang memanas. Akun otomatis dapat membantu menaikkan tagar, mengirim tautan, atau membanjiri percakapan. Akan tetapi, otomatisasi tidak selalu bersifat jahat; layanan berita, organisasi warga, dan lembaga publik juga menggunakan akun otomatis. Pertanyaan yang relevan ialah apakah pengguna mengetahui sifat otomatisnya, apakah akun meniru manusia, apakah perilakunya melanggar aturan, dan apakah ia digunakan untuk menciptakan persepsi dukungan yang tidak autentik.

Ilusi dukungan mayoritas muncul saat aktivitas yang dikoordinasikan terlihat seperti konsensus organik. Pengguna dapat menyimpulkan bahwa pandangan tertentu dominan karena melihat banyak unggahan serupa dalam waktu singkat. Kesimpulan tersebut dapat memengaruhi persepsi tentang norma sosial dan risiko menyuarakan pendapat berbeda. Namun ukuran tren tidak menunjukkan proporsi pemilih. Kampanye terorganisasi, media yang meliput tren, dan perilaku ikut-ikutan dapat memperbesar sinyal awal. Transparansi tentang iklan dan koordinasi membantu publik menafsirkan indikator popularitas.

Pendeteksian bot menghadapi trade-off antara presisi dan cakupan. Aturan yang terlalu ketat dapat menandai pengguna aktif sebagai otomatis; aturan yang longgar melewatkan jaringan penyamaran. Model sering dilatih dari data yang berubah dan platform tidak selalu menyediakan informasi lengkap. Pelaporan hasil harus memisahkan skor probabilitas dari kepastian identitas. Tindakan membatasi akun sebaiknya memiliki pemeriksaan manusia dan jalur banding, terutama saat terjadi menjelang pemilu ketika akses komunikasi sangat penting.

Pengguna dapat memanfaatkan literasi algoritmik untuk memahami bahwa tren merupakan indikator aktivitas, bukan referendum. Jurnalis dapat menjelaskan bagaimana tagar naik, apakah interaksi berasal dari sumber beragam, dan kapan kampanye berbayar berlangsung. Platform dapat memberi konteks tambahan pada metrik yang mudah disalahartikan. Namun beban utama tidak boleh

diletakkan pada setiap individu untuk mengaudit jaringan yang kompleks. Penyedia layanan harus membuka informasi yang cukup agar publik dan peneliti dapat memeriksa pola aktivitas terkoordinasi.

AI generatif dapat menghasilkan komentar dalam bahasa yang alami sehingga deteksi berbasis kualitas bahasa menjadi kurang andal. Sebaliknya, tulisan yang repetitif atau tidak lazim tidak cukup untuk menyatakan bahwa akun dikendalikan mesin. Analisis perlu menggabungkan frekuensi, waktu, keterkaitan jaringan, riwayat konten, dan sumber aktivitas. Perlindungan privasi mengharuskan pengumpulan data minimum dan penyimpanan terbatas. Tujuan pengawasan ialah mengidentifikasi perilaku manipulatif, bukan membuat profil politik setiap warga.

13. AI generatif dan industrialisasi produksi pesan

AI generatif memperluas kapasitas untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan video dengan biaya rendah. Dalam politik, teknologi ini dapat membantu menerjemahkan manifesto, merangkum dokumen, menyusun materi edukasi, atau membuat konten kampanye kreatif. Ia juga dapat menghasilkan variasi pesan yang menyesuaikan isu lokal dan kebutuhan format. Kegunaan tersebut perlu dibedakan dari penyalahgunaan. Sistem yang sama dapat dipakai untuk membuat narasi palsu, komentar massal, atau persona semu. Teknologi bersifat serbaguna; penilaian harus mengamati tujuan dan konteks pemakaiannya.

Produksi konten dalam skala besar dapat mengubah ekonomi disinformasi. Sebelumnya, operasi yang membutuhkan banyak penulis dan penerjemah dapat bergantung pada tenaga manusia; model bahasa mampu mempercepat draf, variasi gaya, dan adaptasi lokal. Penelitian Williams et al. (2025) menguji kemampuan 13 model bahasa menghasilkan materi untuk operasi disinformasi pemilu dan menemukan banyak model dapat memenuhi sejumlah permintaan dalam skenario eksperimen. Temuan ini menunjukkan kemampuan teknis, bukan bukti bahwa operasi semacam itu telah mengubah pemilu tertentu. Kesenjangan antara kemampuan, penerapan, jangkauan, dan dampak perlu dijaga dalam penalaran publik.

Kuantitas konten bukan satu-satunya risiko. AI dapat menurunkan biaya pengujian pesan, membuat konten lebih cepat disesuaikan dengan respons, dan membantu mempertahankan akun dengan persona tertentu. Namun kualitas

sosial dari pesan tidak hanya berasal dari kelancaran bahasa. Kredibilitas membutuhkan sejarah akun, relasi, pengetahuan lokal, dan konsistensi. Karena itu, AI sering menjadi pengganda kapasitas bagi aktor yang sudah memiliki jaringan distribusi, bukan pengganti seluruh organisasi politik.

Kampanye dapat menggunakan model untuk menganalisis pertanyaan warga atau membuat FAQ yang lebih mudah dipahami. Penggunaan ini memerlukan pemeriksaan fakta dan keterbukaan ketika sistem berbicara atas nama kandidat atau lembaga. Chatbot politik perlu membedakan jawaban resmi dari ringkasan otomatis, menyediakan sumber, dan mengakui keterbatasan. Jika chatbot mengarang kebijakan atau meniru percakapan manusia secara tersembunyi, pengguna dapat mengira bahwa mereka menerima jawaban personal dari calon atau staf kampanye.

Kebijakan penggunaan AI generatif harus memusatkan perhatian pada risiko representasi dan penipuan. Label dapat diperlukan ketika konten realistis menampilkan orang nyata dalam situasi atau pernyataan yang tidak terjadi. Materi satir dan ilustrasi yang jelas tidak dimaksudkan untuk menipu membutuhkan perlakuan berbeda. Aturan yang hanya mewajibkan label setiap konten yang tersentuh AI akan terlalu luas dan membingungkan. Definisi perlu menilai perubahan material, kemiripan dengan orang nyata, konteks distribusi, dan potensi audiens salah memahami konten.

14. Deepfake, autentisitas, dan krisis pembuktian

Deepfake dapat memalsukan rupa atau suara seorang tokoh, memotong rekaman autentik, atau menggabungkan materi nyata dan sintetis. Dampak yang ditakutkan meliputi pencemaran reputasi, provokasi, pemerasan, dan pengelabuan tentang prosedur publik. Akan tetapi, deepfake bukan satu-satunya bentuk manipulasi visual. Foto asli dapat disertai keterangan palsu, rekaman lama dapat diklaim sebagai kejadian baru, dan video pendek dapat menghapus konteks. Strategi verifikasi harus mencakup semua jenis manipulasi, bukan terpaku pada identifikasi konten generatif.

Saat video palsu beredar, perhatian sering tertuju pada apakah model deteksi dapat mengenalinya. Detektor memiliki tingkat kesalahan dan dapat gagal ketika video dikompresi, diedit, atau dihasilkan dengan metode baru. Hasil deteksi

sebaiknya diperlakukan sebagai indikator, bukan vonis. Verifikasi yang lebih kuat menggabungkan sumber pertama, metadata, rantai penguasaan file, perbandingan versi, rekaman lain dari waktu dan lokasi sama, serta keterangan saksi. Lembaga perlu menyimpan bukti sebelum konten dihapus atau berubah.

Autentikasi membuktikan sebagian hal, bukan semua. Tanda tangan digital dapat membantu menunjukkan asal file dan perubahan setelah perekaman, tetapi tidak membuktikan bahwa isi pernyataan benar atau tidak dipotong sebelum proses penandatanganan. Sebaliknya, ketiadaan metadata tidak berarti konten palsu; informasi dapat hilang saat platform mengompresi atau membagikan ulang. Pendidikan publik perlu menjelaskan batas teknis agar tanda autentik tidak menjadi simbol kebenaran mutlak.

Ketersediaan deepfake juga memberi keuntungan bagi orang yang ingin menyangkal rekaman autentik. Ketika masyarakat tahu bahwa video dapat direkayasa, seorang pejabat dapat menyebut bukti yang tidak menguntungkan sebagai AI palsu. Fenomena yang dikenal sebagai liar's dividend menuntut dokumentasi yang kuat dan investigasi independen. Media perlu mempertahankan file asli, mencatat sumber, dan menjelaskan metode pemeriksaan. Institusi sebaiknya tidak mengandalkan satu kanal komunikasi yang mudah ditiru, tetapi menyediakan pengumuman melalui beberapa kanal terverifikasi.

Penyebaran rekaman palsu yang sangat emosional dapat merusak reputasi bahkan setelah klarifikasi. Penghapusan tidak selalu menghilangkan salinan, dan pengulangan klaim dalam berita bantahan dapat memperluas jangkauannya. Respons perlu mempertimbangkan hak korban, kepentingan publik, dan bahaya reproduksi. Materi dapat dijelaskan tanpa menampilkan ulang bagian yang paling merugikan. Platform sebaiknya memberi cara untuk mengajukan banding dan mempercepat penanganan terhadap peniruan identitas yang menimbulkan kerugian nyata.

15. Bukti empiris: hubungan bukan otomatis sebab-akibat

Klaim bahwa algoritma menyebabkan polarisasi memerlukan lebih dari sekadar korelasi antara penggunaan media sosial dan sikap partisan. Orang yang sudah memiliki pandangan kuat mungkin lebih sering memilih sumber searah, sehingga arah sebab-akibat dapat berjalan dari sikap ke paparan. Lingkungan politik,

identitas, dan media tradisional dapat memengaruhi keduanya. Penelitian perlu memisahkan seleksi pengguna, pengaruh rekomendasi, perubahan konten, dan peristiwa politik yang terjadi bersamaan. Tanpa desain yang mampu membedakan mekanisme, kesimpulan kausal berisiko terlalu kuat.

Eksperimen memberikan kontrol lebih besar terhadap paparan, tetapi juga memiliki batas. Peserta dapat berbeda dari pengguna umum; paparan singkat tidak selalu mewakili penggunaan harian; pengukuran sikap dapat dipengaruhi cara pertanyaan dirumuskan. Eksperimen platform berskala besar dapat memeriksa perubahan nyata dalam feed, namun biasanya berlangsung pada negara, masa, dan kelompok tertentu. Hasil negatif atau nihil juga bermakna: ia menunjukkan bahwa satu intervensi tidak mengubah ukuran hasil dalam jangka waktu penelitian, bukan bahwa platform tidak pernah memiliki dampak.

Penelitian Guess et al. (2023) terhadap feed Facebook dan Instagram menjelang pemilu AS 2020 menunjukkan bahwa perubahan ke kronologi mengubah pengalaman paparan dan perilaku penggunaan, tetapi tidak menghasilkan perbedaan signifikan pada sejumlah sikap utama seperti polarisasi dalam periode studi tiga bulan. Temuan ini menantang asumsi bahwa algoritma rekomendasi selalu langsung meningkatkan polarisasi. Ia tidak menutup kemungkinan dampak jangka panjang, efek pada kelompok tertentu, atau pengaruh di platform lain. Konteks dan periode eksperimen tetap menjadi bagian dari interpretasi.

Penelitian observasional dapat menjangkau skala besar dan rentang waktu panjang, tetapi sulit mengendalikan faktor pembaur. Data platform sering tidak mewakili orang yang jarang menggunakan layanan atau tidak aktif memposting. Penghapusan unggahan, perubahan API, dan pergeseran aturan privasi juga mengubah sampel. Peneliti harus melaporkan keterbatasan data, metode klasifikasi, dan cara menangani konten yang tidak dapat diakses. Transparansi metodologis mencegah hasil statistik dipakai untuk klaim politik yang tidak ditopang desain.

Tinjauan literatur membantu menilai konsistensi temuan lintas studi. Tinjauan Lorenz-Spreen et al. (2023) menyintesis bukti kausal dan korelasional tentang media digital dan demokrasi di berbagai negara, serta memperlihatkan bahwa dampak tidak selalu satu arah. Bukti tentang partisipasi, pengetahuan, polarisasi, dan kepercayaan berbeda menurut konteks dan cara pengukuran. Karena banyak

studi masih terkonsentrasi di Amerika Serikat, peneliti Indonesia perlu mengembangkan data dan teori yang berakar pada kondisi lokal.

16. Mengukur polarisasi dan risiko salah baca data

Pengukuran polarisasi perlu menentukan objeknya: jarak sikap kebijakan, rasa suka terhadap kelompok, keterpisahan jaringan, permusuhan, atau persepsi atas kubu lawan. Pengukuran sentimen otomatis dari unggahan tidak identik dengan sikap warga. Bahasa yang kasar dapat bersifat satire atau kutipan; bahasa santun dapat tetap mengandung penolakan politik. Validasi manual oleh anotator yang memahami konteks diperlukan, terutama untuk bahasa Indonesia yang kaya ragam, singkatan, campur kode, dan ekspresi lokal.

Survei dapat mengukur sikap yang tidak tampak dalam data publik. Akan tetapi, sampel harus representatif dan pertanyaan harus memisahkan sikap terhadap kebijakan dari sikap terhadap kelompok. Responden dapat menyesuaikan jawaban dengan norma yang dianggap aman. Survei berulang memungkinkan analisis perubahan, tetapi perlu menjaga konsistensi instrumen. Bila definisi atau urutan pertanyaan berubah, kenaikan skor belum tentu menunjukkan peningkatan polarisasi yang sesungguhnya.

Ukuran jaringan seperti modularitas, assortativity, atau keterhubungan antarkelompok dapat menunjukkan pola segregasi. Indikator teknis itu tidak memberi tahu apakah pengguna saling membenci atau sekadar mengikuti akun yang meliput isu sama. Satu orang juga dapat memiliki beberapa identitas dan jaringan yang tidak tercermin di satu platform. Analisis jaringan perlu disertai pemeriksaan isi dan wawancara. Kesimpulan tentang "masyarakat terbelah" tidak boleh dibuat hanya dari peta interaksi pada satu situs.

Perbandingan antarplatform dan antarperiode membutuhkan definisi tetap. Perubahan fitur, moderasi, atau cara mengumpulkan data dapat mengubah angka. Jika suatu platform membuka feed kronologis atau mengganti rekomendasi, pola paparan berubah tanpa perubahan sikap. Peneliti sebaiknya mendokumentasikan versi sistem dan kebijakan yang berlaku ketika data dikumpulkan. Replikasi membantu menguji apakah temuan dapat bertahan di luar satu pemilihan atau insiden viral.

Pengukuran dampak perlu mencakup hasil positif dan negatif. Metrik seperti keterpaparan terhadap pandangan berbeda perlu dilengkapi dengan kualitas

pemahaman, kemampuan mengoreksi klaim, kesediaan menerima legitimasi lawan, dan tingkat kepercayaan pada proses. Peningkatan interaksi lintas kelompok tidak selalu berarti dialog konstruktif; perdebatan bisa menjadi lebih agresif. Evaluasi kebijakan perlu melaporkan trade-off dan distribusi dampak, bukan hanya satu angka keberhasilan.

17. Disinformasi politik di Indonesia: konteks dan batas bukti

Indonesia memiliki ekosistem digital yang besar dan beragam, tetapi akses, bahasa, serta pola konsumsi media tidak seragam. Warga berinteraksi melalui platform video, jejaring sosial, aplikasi percakapan, media daring, televisi, dan jaringan komunitas. Isu politik sering dibicarakan melalui bahasa Indonesia serta bahasa daerah atau campuran. Konteks lokal menentukan arti istilah, simbol, dan humor. Model moderasi dan deteksi yang dilatih terutama pada bahasa global dapat salah membaca ekspresi lokal, sehingga tata kelola memerlukan evaluasi yang melibatkan penutur dan komunitas setempat.

Pemilu 2019 memperlihatkan intensitas perdebatan digital dan penggunaan narasi identitas, sementara Pemilu 2024 berlangsung ketika AI generatif telah lebih dikenal publik dan kampanye digital semakin matang. Perbandingan ini tidak boleh menyimpulkan bahwa semua konten politik pada periode baru dibuat AI. Keberadaan konten sintetis, animasi kandidat, atau materi kreatif berbantuan AI harus dibedakan dari deepfake yang bermaksud menipu. Arsip konten dan pemeriksaan sumber diperlukan untuk menilai jenis penggunaan secara konkret.

Kajian Subekti et al. (2025) mengenai Pemilu Presiden 2024 menguraikan pola disinformasi di media sosial yang menyerang kandidat melalui isu dan karakter. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan memberi gambaran tentang pola distribusi, termasuk peran video dan teks pada platform sosial. Kajian ini penting untuk konteks lokal, tetapi tidak mengukur secara langsung efek kausal algoritma terhadap preferensi atau hasil suara. Pembedaan batas metodologis seperti ini menjaga agar literatur Indonesia digunakan secara akurat.

Kajian Jalli dan Wihardja (2024) mengangkat pelajaran integritas pemilu di tengah munculnya AI dalam komunikasi politik Indonesia. Mereka menekankan bahwa tata kelola perlu memperhatikan seluruh rantai informasi, bukan hanya produk AI. Artinya, sumber data, produksi, distribusi, platform, pemeriksaan, dan respons

institusi berhubungan. Analisis ini selaras dengan pendekatan artikel: ancaman muncul dari perpaduan teknologi dengan struktur dan aktor, bukan dari model generatif secara terisolasi.

Riset Indonesia membutuhkan data yang lebih sistematis tentang paparan, kepercayaan, variasi daerah, dan pengalaman kelompok. Belum cukup hanya mengumpulkan unggahan viral atau kasus yang paling dramatis. Perlu penelitian panel untuk melihat perubahan sikap dari waktu ke waktu, wawancara untuk memahami motivasi berbagi, eksperimen untuk menguji cara koreksi, dan audit platform yang menghormati privasi. Kolaborasi antara universitas, penyelenggara, media, dan masyarakat sipil dapat memperluas akses bukti sekaligus menjaga independensi penelitian.

18. Bahasa, budaya, dan bias sistem moderasi

Bahasa politik Indonesia sering menggunakan ironi, plesetan, singkatan, dan ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks. Sistem moderasi yang melihat kata secara terpisah dapat menandai kritik sah sebagai ujaran kebencian atau gagal mendeteksi ancaman yang disampaikan melalui kode lokal. Kesalahan ini tidak tersebar merata. Kelompok yang memakai dialek, istilah komunitas, atau bahasa minoritas bisa lebih sering salah diklasifikasikan. Oleh karena itu, ukuran akurasi keseluruhan perlu dilengkapi dengan evaluasi per ragam bahasa dan kelompok yang relevan.

AI generatif juga dapat menghasilkan bahasa yang tampak alami tetapi membawa stereotip atau kesalahan budaya. Model mungkin membuat generalisasi tentang suatu daerah, agama, atau kelompok sosial berdasarkan pola data yang tidak seimbang. Ketika materi tersebut dibagikan sebagai analisis objektif, otoritas mesin dapat memperkuat stigma. Penggunaan model untuk merangkum sentimen publik harus disertai pemeriksaan terhadap bias pengambilan sampel dan cara model mengelompokkan pandangan.

Pengembangan dataset bahasa lokal memerlukan tata kelola yang sensitif. Mengumpulkan percakapan publik tidak otomatis berarti bebas dari risiko privasi. Unggahan yang terbuka dapat mengandung identitas, lokasi, atau pengalaman rentan. Peneliti perlu meminimalkan data, meminta izin sesuai konteks, menghapus pengenal yang tidak diperlukan, dan melibatkan komunitas dalam

pemilihan label. Dataset tidak seharusnya menjadi sumber bagi penargetan politik atau pengawasan yang tidak terkait tujuan penelitian.

Kebijakan moderasi perlu mengakui perbedaan antara bahasa kasar, kritik politik, ujaran kebencian, ancaman, dan ajakan kekerasan. Pembedaan ini memerlukan prosedur banding yang mudah, akses kepada moderator yang memahami bahasa, serta publikasi data tentang kesalahan penegakan. Pengguna perlu diberi tahu alasan konten dibatasi dan bagaimana memperbaikinya. Transparansi tidak mengharuskan platform membuka data pribadi pelapor atau rahasia keamanan, tetapi harus cukup untuk mencegah keputusan sewenang-wenang.

Keterlibatan pakar lokal sebaiknya berlangsung sejak tahap desain, bukan hanya setelah sistem gagal. Jurnalis daerah, ahli bahasa, organisasi komunitas, peneliti, dan kelompok yang sering menjadi sasaran ujaran dapat membantu merumuskan skenario uji. Mereka juga dapat mengidentifikasi implikasi budaya yang tidak tampak bagi pengembang. Namun konsultasi bukan pengganti akuntabilitas vendor dan platform. Pihak yang mengendalikan sistem tetap harus menanggapi temuan dan mendanai perbaikan.

19. Polarisasi dalam kontestasi pemilu dan komunikasi elite

Masa pemilu meningkatkan intensitas komunikasi dan urgensi untuk menarik perhatian. Kandidat, partai, relawan, media, serta pendukung bersaing menguasai agenda. Algoritma dapat membantu pesan tertentu menjangkau lebih banyak pengguna, tetapi jumlah interaksi tidak selalu menunjukkan persuasi atau perubahan pilihan. Konten dapat berfungsi untuk memobilisasi pendukung sendiri, menjaga loyalitas, menggalang dana, atau memancing respons lawan. Menilai efek kampanye perlu mengidentifikasi tujuan dan audiens, bukan hanya menghitung tayangan.

Elite politik memiliki kemampuan untuk memberi nama pada kelompok, menetapkan isu yang dianggap penting, dan memberi legitimasi pada sumber informasi. Ketika pemimpin menyebarkan klaim yang meragukan atau mengabaikan norma koreksi, pendukung dapat meniru sikap tersebut. Peran elite menjelaskan mengapa polarisasi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada algoritma. Platform dapat memperluas jangkauan pesan elite, tetapi aktor politik memilih pesan dan mempertanggungjawabkan konsekuensi publiknya.

Kampanye negatif tidak selalu sama dengan disinformasi. Kritik atas rekam jejak, janji, atau kebijakan dapat menjadi bagian penting dalam pengawasan demokratis. Namun informasi palsu tentang identitas, kesehatan, ucapan, atau tindakan kandidat dapat merusak reputasi dan kualitas pilihan. Praktik yang membingungkan batas antara kritik dan pemalsuan memerlukan verifikasi dan transparansi sponsor. Aturan harus menjaga ruang bagi investigasi jurnalistik dan satire sekaligus menangani peniruan yang menipu.

Kampanye digital juga dapat memperbesar perbedaan antara pengalaman online dan percakapan offline. Seorang pengguna mungkin melihat pertengkaran yang tampak ekstrem di platform, lalu menganggapnya mewakili seluruh masyarakat. Media dapat memperkuat kesan tersebut ketika mengutip unggahan viral sebagai cerminan opini nasional. Survei dan riset lapangan membantu memeriksa apakah percakapan digital benar-benar mencerminkan sikap publik. Jika terdapat jarak, media perlu menyatakan bahwa sampel online memiliki bias dan tidak sama dengan pemilih secara keseluruhan.

Setelah pemilu, polarisasi dapat berlanjut melalui narasi mengenai legitimasi hasil, identitas pendukung, dan perlakuan terhadap kelompok yang kalah. Koreksi cepat dan informasi yang dapat diaudit membantu, tetapi tidak cukup jika lembaga memiliki masalah kepercayaan yang telah lama berlangsung. Penguatan prosedur, akses pada bukti, jalur sengketa, dan komunikasi yang konsisten menjadi fondasi penerimaan. Teknologi dapat membantu distribusi dokumen, tetapi legitimasi bergantung pada proses yang adil serta pengawasan independen.

20. Moderasi konten, kebebasan berekspresi, dan banding

Moderasi diperlukan untuk menanggapi ancaman, ujaran kebencian, impersonasi, dan kampanye terkoordinasi yang menipu. Namun keputusan membatasi konten juga memengaruhi kebebasan berekspresi dan akses informasi. Sistem otomatis dapat bekerja cepat dalam volume besar, tetapi sering kesulitan mengenali konteks, satire, dan kepentingan publik. Penghapusan yang keliru dapat menekan suara minoritas atau kritik terhadap pemerintah. Kebijakan yang tepat memerlukan definisi, proses, dan transparansi, tidak sekadar target jumlah konten yang ditindak.

Pendekatan moderasi bertingkat dapat menyesuaikan respons dengan risiko. Konten yang berpotensi melanggar tetapi belum jelas dapat diberi konteks atau

dibatasi distribusinya sementara. Ancaman langsung atau penipuan prosedural mungkin memerlukan tindakan lebih cepat. Setiap tingkat harus disertai dasar dan masa tinjau. Perusahaan tidak boleh menyembunyikan dampak tindakan dengan menganggap penurunan jangkauan bukan bentuk pembatasan; pengguna tetap perlu mendapat penjelasan yang memadai.

Prosedur banding adalah bagian dari akuntabilitas. Pengguna dapat mengajukan konteks tambahan, menunjukkan bahwa konten satir atau jurnalistik, atau memperbaiki informasi. Sistem banding otomatis yang hanya menghasilkan jawaban generik tidak cukup ketika dampaknya signifikan. Perlu jalur peninjauan manusia untuk kasus kompleks, tenggat yang jelas, dan laporan tentang jumlah banding yang diterima atau ditolak. Mekanisme ini juga memberi data untuk memperbaiki model moderasi.

Keputusan moderasi dapat menjadi sasaran tekanan politik. Pemerintah mungkin meminta penghapusan konten yang mengkritik pejabat, sementara kelompok berkepentingan dapat melaporkan konten lawan secara massal. Platform harus membedakan permintaan hukum yang sah dari tekanan informal dan mengungkap jumlah serta kategori permintaan. Proses penegakan hukum tetap harus melalui kewenangan yang jelas dan dapat diuji. Moderasi swasta tidak boleh menjadi cara menghindari standar hak yang berlaku untuk pembatasan oleh negara.

Kualitas moderasi harus dinilai melalui audit independen dan pengujian kelompok. Audit meninjau apakah kebijakan diterapkan konsisten pada bahasa, topik, dan kelompok politik berbeda. Peneliti perlu mendapat akses aman terhadap data agregat dan prosedur banding. Hasil audit yang diterbitkan dapat meningkatkan kepercayaan jika mencakup kesalahan dan batas sistem, bukan hanya klaim keberhasilan. Publikasi detail harus menyeimbangkan transparansi dengan keamanan moderator dan privasi pengguna.

21. Koreksi, pemeriksaan fakta, dan desain informasi

Pemeriksaan fakta membantu menilai klaim yang dapat diverifikasi, tetapi tidak semua konflik politik bersifat faktual. Sebagian menyangkut prediksi, nilai, prioritas, atau interpretasi. Pemeriksa fakta perlu menjelaskan batas penilaian: apakah klaim dapat diuji, bukti apa yang digunakan, dan seberapa pasti

kesimpulannya. Bahasa putusan yang terlalu kategoris dapat menimbulkan kesan bias, sementara penjelasan yang panjang mungkin sulit dibagikan. Format ringkas dapat menarik perhatian, dengan rujukan lengkap tersedia untuk pembaca yang ingin meninjau bukti.

Koreksi lebih mudah diterima jika datang dari sumber yang dipercaya audiens. Artinya, ekosistem memerlukan beragam lembaga kredibel, bukan satu pusat kebenaran yang mudah dicurigai. Media lokal, ahli, organisasi profesi, komunitas, dan penyelenggara dapat memainkan peran yang saling melengkapi. Mereka perlu menjaga standar metodologis yang sama dan mengungkap konflik kepentingan. Konsistensi proses membantu warga membedakan koreksi berbasis bukti dari pesan politik tandingan.

Format platform memengaruhi bagaimana koreksi beredar. Jika konten asli tersebar dalam video pendek, teks panjang mungkin tidak menjangkau audiens yang sama. Koreksi dapat dibuat dalam format yang mudah dibagikan, tetapi tidak boleh mengorbankan penjelasan. Tautan ke dokumen primer, arsip, dan metode verifikasi memberi kesempatan untuk memeriksa lebih jauh. Platform dapat menambahkan konteks tepat di dekat klaim, namun harus menghindari label yang menyatakan sesuatu salah sebelum proses cukup kuat.

Prebunking mengenalkan teknik manipulasi sebelum audiens melihat contoh tertentu, misalnya impersonasi, konteks palsu, atau penggunaan akun palsu. Strategi ini dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa meminta orang menghafal semua rumor. Efektivitasnya bergantung pada kesesuaian bahasa, kepercayaan sumber, dan pengulangan yang wajar. Pendidikan preventif juga harus menghindari efek samping berupa skeptisisme menyeluruh. Pesan yang baik mengajarkan cara memeriksa, bukan menyuruh warga menganggap semua informasi sebagai palsu.

Platform dapat mengubah fitur untuk memperlambat penyebaran tanpa langsung menghapus. Pembatasan penerusan, konfirmasi sebelum membagikan tautan yang belum dibuka, atau konteks tambahan dapat menciptakan jeda untuk berpikir. Intervensi ini perlu diuji apakah benar menurunkan penyebaran tanpa menghambat komunikasi penting. Efek harus dianalisis lintas bahasa dan kelompok pengguna. Desain yang hanya berfungsi pada satu platform atau satu jenis konten dapat mendorong perpindahan ke kanal yang lebih tertutup.

22. Pengaruh algoritma di luar ruang digital

Perubahan online dapat memengaruhi percakapan tatap muka ketika warga membawa narasi, gambar, dan kecurigaan ke rumah, tempat kerja, organisasi, atau komunitas. Sebaliknya, konflik offline dapat masuk ke platform dan memperoleh bentuk baru. Pemisahan tegas antara kehidupan digital dan non-digital tidak sesuai dengan pengalaman masyarakat yang menggunakan beberapa kanal secara bersamaan. Penelitian perlu menelusuri perpindahan pesan dan makna antarlingkungan, tanpa menyimpulkan bahwa setiap konflik sosial berasal dari media sosial.

Konten viral dapat memengaruhi agenda media tradisional. Jurnalis mungkin mengangkat unggahan yang menarik perhatian, lalu liputan itu memberi legitimasi baru pada narasi online. Pemimpin politik juga dapat merespons tren dan memperluas jangkauannya. Proses lintas media ini menciptakan umpan balik. Platform bukan satu-satunya produsen informasi, dan media tradisional bukan pihak pasif. Hubungan keduanya perlu ditelaah untuk memahami bagaimana klaim memperoleh otoritas.

Kampanye disinformasi dapat memicu kekerasan atau diskriminasi dalam konteks tertentu, terutama ketika narasi mengidentifikasi kelompok sebagai ancaman dan mendorong tindakan. Namun hubungan itu dipengaruhi kondisi sosial, kemampuan institusi, sejarah konflik, dan organisasi di lapangan. Menyimpulkan bahwa sebuah unggahan menyebabkan kerusuhan tanpa bukti mekanisme dapat mengabaikan faktor lain. Analisis risiko perlu menggabungkan pemantauan digital dan pemahaman situasi komunitas.

Polarisasi dapat memengaruhi kualitas kerja sama pemerintahan setelah pemilu. Jika kelompok memandang kompromi sebagai pengkhianatan, kebijakan lintas partai menjadi lebih sulit. Di tingkat lokal, ketegangan dapat menghambat forum warga dan koordinasi pelayanan. AI tidak secara langsung menentukan hubungan tersebut, tetapi sistem komunikasi yang memelihara narasi permusuhan dapat memperburuk iklim. Penguatan ruang musyawarah dan akuntabilitas pejabat tetap penting di luar platform.

Kepercayaan kepada lembaga dipengaruhi pengalaman nyata seperti pelayanan, keadilan penegakan hukum, dan kualitas kebijakan. Disinformasi dapat mempercepat penyebaran tuduhan, tetapi lembaga yang konsisten dan terbuka

lebih mampu menjawabnya. Upaya melawan rumor tidak akan bertahan jika publik terus menemukan masalah yang tidak ditangani. Transparansi, pemeriksaan independen, dan akses data publik menjadi bagian dari integritas informasi, bukan sekadar komunikasi krisis.

23. Dampak terhadap jurnalisme dan ruang publik

Jurnalisme menghadapi tekanan untuk melaporkan cepat di tengah arus konten sintetis dan klaim viral. Kecepatan dapat meningkatkan keterjangkauan, tetapi juga berisiko membuat media mengulang disinformasi. Prosedur redaksi perlu menetapkan bagaimana memverifikasi video, mengutip unggahan, mengungkap penggunaan AI, dan memperbaiki laporan. Catatan sumber, waktu, metode pemeriksaan, dan perubahan artikel membantu pembaca memahami proses. Koreksi yang transparan membangun kredibilitas jangka panjang.

AI dapat membantu redaksi melakukan transkripsi, pencarian dokumen, penerjemahan, dan pengelompokan data. Alat tersebut dapat memperluas kapasitas investigasi apabila wartawan memeriksa hasil dan menjaga keamanan sumber. Model generatif dapat mengarang fakta atau meratakan perbedaan pandangan, sehingga ringkasan otomatis harus diverifikasi terhadap bahan asli. Redaksi sebaiknya tidak memasukkan dokumen sensitif ke layanan eksternal tanpa menilai kebijakan data dan risiko privasi.

Ekonomi media lokal dan independen berpengaruh terhadap integritas informasi. Jika berita bermutu sulit dibiayai, ruang dapat diisi oleh konten partisan atau materi yang dirancang semata-mata untuk keterlibatan. Platform dapat membantu distribusi, tetapi algoritma dan pembagian pendapatan dapat berubah tanpa kendali redaksi. Kebijakan yang mendorong pluralitas, akses informasi publik, dan dukungan pada jurnalisme independen dapat memperkuat ruang publik tanpa mengatur isi berita secara langsung.

Media dapat menjadi penghubung antarkelompok dengan menyediakan konteks, bukan sekadar menampilkan pertengkaran yang paling ramai. Liputan dapat menjelaskan alasan kelompok berbeda, memeriksa klaim, dan menunjukkan titik kesepakatan. Ini bukan berarti menyamakan semua posisi atau menghindari konflik. Jurnalisme tetap perlu menginvestigasi kekuasaan dan melaporkan ketidakadilan, tetapi memberi pembaca alat untuk memahami perbedaan secara lebih akurat.

Pluralisme sumber penting untuk mencegah dominasi satu narasi, namun kualitas sumber juga perlu diperhatikan. Keberagaman tidak berarti memberi bobot setara pada klaim yang didukung bukti dan yang tidak. Algoritma kurasi berita dapat menampilkan sumber yang beragam, tetapi pembaca memerlukan konteks tentang metode, pemilik, dan koreksi. Literasi media yang kuat membantu warga menilai kredibilitas tanpa menyamakan kritik terhadap media dengan bukti bahwa semua media berbohong.

24. Kepercayaan publik dan kesediaan merevisi keyakinan

Kepercayaan publik tidak identik dengan kesediaan menerima setiap pernyataan pemerintah, media, atau platform. Kepercayaan yang sehat memungkinkan warga memeriksa institusi sekaligus memberi ruang bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya jika prosesnya transparan. Ketidakpercayaan total membuat koreksi sulit diterima, sementara kepercayaan tanpa pengawasan membuka ruang penyalahgunaan. Demokrasi memerlukan kepercayaan yang dapat dikalibrasi oleh bukti, pengalaman, dan prosedur banding.

Disinformasi dapat melemahkan kepercayaan melalui dua jalan. Ia dapat membuat warga percaya pada klaim tertentu yang salah, atau membuat mereka ragu pada semua sumber sehingga tidak tahu apa yang benar. Jalan kedua sering kurang terlihat tetapi dapat merusak deliberasi. Jika publik merasa setiap rekaman bisa dipalsukan dan setiap koreksi memiliki agenda, ketidakpastian menjadi sumber kekuasaan bagi aktor yang ingin menghindari pertanggungjawaban.

Kesediaan merevisi keyakinan bergantung pada iklim sosial. Orang lebih mungkin mengakui kesalahan jika tidak akan dipermalukan atau kehilangan tempat dalam kelompoknya. Kampanye publik yang menghina orang yang salah percaya dapat mendorong mereka bertahan. Koreksi yang efektif memberi alasan untuk berubah tanpa menuntut pengakuan di muka umum. Pendekatan ini bukan pengampunan terhadap operasi penipuan; ia merupakan cara mengurangi hambatan psikologis bagi pembelajaran.

Institusi membangun kepercayaan melalui konsistensi. Jika lembaga cepat memperbaiki informasi salah, mengungkap metode, dan menerapkan aturan pada semua pihak, publik memiliki alasan untuk menerima penjelasannya. Jika lembaga

hanya membantah ketika reputasinya terancam, klarifikasi mungkin dianggap propaganda. Karena itu, komunikasi krisis harus dimulai sebelum insiden: keterbukaan data, prosedur pengaduan, dan audit rutin menciptakan cadangan kredibilitas.

AI dapat meningkatkan kualitas layanan informasi melalui jawaban cepat dan pencarian data, tetapi jawaban yang salah dalam skala besar dapat merusak reputasi dengan cepat. Sistem pemerintah harus menyebut sumber, membatasi jawaban pada informasi yang dapat dipastikan, dan mengalihkan pertanyaan kompleks kepada petugas. Pengguna harus dapat melaporkan kesalahan dan melihat perbaikannya. Kepercayaan terhadap AI tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan kepada organisasi yang memilih, mengoperasikan, dan mengawasi model.

Ruang publik yang plural dan komunikasi lintas kelompok

Demokrasi memerlukan ruang tempat warga dapat mendengar argumen, membentuk asosiasi, dan mempertanyakan keputusan. Ruang digital memperluas kesempatan itu: komunitas kecil dapat mengorganisasi bantuan, kelompok yang kurang terwakili dapat membangun suara, dan informasi kebijakan dapat beredar cepat. Karena itu, upaya mengurangi polarisasi tidak seharusnya bermakna menghilangkan perbedaan, menuntut keseragaman, atau melarang kritik. Persoalan muncul ketika penghinaan, ancaman, manipulasi, dan ketimpangan distribusi menghalangi partisipasi yang setara.

Paparan terhadap pandangan berbeda tidak selalu memperbaiki pemahaman. Jika pertemuan berlangsung dalam suasana saling merendahkan, seseorang dapat semakin meneguhkan identitas kelompoknya. Rancangan ruang diskusi perlu memberi konteks, aturan partisipasi, moderasi yang konsisten, dan kesempatan menjelaskan posisi tanpa harus menerima semua pendapat sebagai benar. Dialog lintas kelompok lebih bermanfaat ketika peserta berbagi masalah konkret, memiliki status yang relatif setara, dan diarahkan pada pemahaman atau kerja sama yang dapat diamati.

Jurnalisme lokal dan organisasi komunitas dapat menjadi jembatan yang lebih dipercaya daripada pesan anonim. Mereka memahami bahasa, kepentingan, dan sejarah setempat, serta dapat mempertemukan warga dengan pengalaman berbeda. Namun, kepercayaan lokal juga dapat disalahgunakan oleh tokoh yang

mengklaim mewakili seluruh komunitas. Keanekaragaman sumber dan mekanisme koreksi tetap penting. Ruang publik yang kuat tidak menggantungkan kebenaran kepada satu figur atau satu platform.

Desain rekomendasi dapat mendukung pluralisme melalui pilihan pengguna, pengaturan yang mudah ditemukan, dan penjelasan mengapa suatu konten muncul. Opsi untuk melihat urutan kronologis, topik yang dipilih, atau sumber yang diikuti memberi kendali lebih besar. Pengaturan itu harus mudah diubah tanpa membuat pengalaman dasar menjadi rumit. Keberagaman bukan sekadar menambahkan konten yang berlawanan untuk setiap pengguna; relevansi, mutu sumber, dan keselamatan interaksi juga menentukan apakah paparan itu berguna.

Komunikasi politik yang sehat membutuhkan norma bahwa lawan adalah pesaing yang sah, bukan musuh yang harus dihapus. Platform tidak dapat menciptakan norma itu sendirian, tetapi desain yang memberi insentif pada penghinaan dapat membuatnya lebih sulit dipertahankan. Partai, pejabat, media, dan tokoh masyarakat memberi teladan melalui pilihan kata dan kesediaan mengoreksi klaim sendiri. Norma demokratis tumbuh ketika warga melihat bahwa perbedaan dapat dikelola melalui aturan bersama dan hasil politik tetap dapat digugat melalui prosedur.

Indikator keberhasilan dan pembelajaran berkelanjutan

Tata kelola yang baik dimulai dengan pertanyaan yang dapat dievaluasi. Apakah pengguna lebih mudah mengenali sumber resmi? Apakah iklan politik dapat ditelusuri? Apakah kesalahan moderasi turun tanpa menghambat kritik yang sah? Apakah peneliti lokal memperoleh akses aman? Apakah korban ancaman memperoleh respons tepat waktu? Indikator tersebut harus ditetapkan sebelum intervensi dilakukan, agar keberhasilan tidak didefinisikan ulang setelah hasil diketahui.

Setiap indikator memerlukan ukuran awal dan kelompok pembanding yang masuk akal. Jika suatu platform meluncurkan label AI, penilaian dapat membandingkan pemahaman pengguna sebelum dan sesudah serta menguji apakah label dipahami saat konten dibagikan ulang. Jika sistem rekomendasi diubah, pengukuran perlu memeriksa pengalaman dan paparan yang berubah, bukan menyimpulkan dampak pada demokrasi dari satu angka engagement.

Metode kualitatif membantu menjelaskan mengapa angka berubah dan siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung biaya.

Pelaporan sebaiknya menyajikan hasil agregat sekaligus perbedaan yang relevan, misalnya bahasa, jenis akun, atau format konten, sepanjang tidak membuka identitas individu. Rata-rata dapat menyembunyikan kelompok kecil yang mengalami dampak besar. Sebaliknya, pemecahan kategori berlebihan dapat membuat sampel tidak andal atau mengidentifikasi komunitas. Pelaporan yang bertanggung jawab menerangkan kompromi metodologis tersebut dan memungkinkan peninjauan oleh pihak independen.

Evaluasi perlu memungkinkan kebijakan dihentikan atau diubah bila menimbulkan dampak buruk. Label yang ternyata membingungkan, akses riset yang membocorkan data, atau moderasi yang memblokir jurnalisme harus memicu koreksi prosedur. Pembelajaran pascakejadian tidak mencari kambing hitam untuk setiap kegagalan, tetapi menetapkan tanggung jawab dan memastikan perubahan benar-benar dilaksanakan. Hasil evaluasi berikutnya menilai apakah pembaruan itu bekerja di lapangan.

Dengan siklus ukur, tinjau, dan perbaiki, penanganan disinformasi menjadi bagian dari tata kelola rutin, bukan operasi darurat yang hanya aktif menjelang pemilu. Masyarakat dapat membandingkan komitmen dengan hasil yang dipublikasikan dan meminta alasan atas keputusan. Akuntabilitas semacam ini tidak menjanjikan kesepakatan politik, tetapi memperkuat kondisi agar warga dapat berdebat berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri serta mengetahui bagaimana kesalahan ditangani.

Keterbukaan indikator perlu diimbangi penjelasan tentang apa yang tidak diukur. Penurunan jumlah unggahan menyesatkan yang terdeteksi, misalnya, bisa menunjukkan berkurangnya produksi atau bisa pula menunjukkan bahwa metode deteksi tidak lagi mengenali format baru. Demikian juga, meningkatnya laporan pengguna dapat berarti masalah memburuk atau kemampuan pelaporan membaik. Membaca angka bersama catatan metode, perubahan kebijakan, dan konteks peristiwa mencegah kesimpulan yang terlalu cepat.

Pembelajaran harus menjangkau publik dalam bentuk yang mudah dipahami. Laporan teknis yang hanya tersedia bagi ahli tidak cukup untuk membangun kepercayaan. Ringkasan bahasa sederhana, penjelasan tentang ketidakpastian, dan contoh keputusan yang telah diperbaiki membantu warga melihat bagaimana

pengawasan bekerja. Keterbukaan ini memberi kesempatan kepada jurnalis dan komunitas untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan menyarankan indikator yang sebelumnya luput.

Ekonomi politik dari data dan perhatian

Analisis pengaruh algoritma perlu melihat ekonomi politik yang membiayainya. Data perilaku menjadi bahan untuk memprediksi minat, mengurutkan konten, dan menjual akses kepada audiens. Perhatian yang berhasil dipertahankan menghasilkan nilai bagi platform dan pengiklan, sedangkan biaya sosial dari kemarahan, salah informasi, atau ketidakpercayaan dapat tersebar kepada masyarakat. Struktur ini tidak berarti bahwa setiap perusahaan sengaja menginginkan konflik. Namun tujuan optimasi dan ukuran keberhasilan dapat mendorong keputusan yang menguntungkan keterlibatan cepat, walaupun kualitas percakapan publik tidak terukur dengan cara sama.

Model bisnis berbasis iklan juga mengubah hubungan antara pembicara dan pendengar. Pesan politik tidak hanya disebarkan kepada pengikut yang memilihnya, tetapi dapat ditargetkan kepada segmen yang tidak terlihat oleh kelompok lain. Pesan yang berbeda kepada audiens yang berbeda menyulitkan pemeriksaan silang dan pertanggungjawaban. Arsip iklan, transparansi sponsor, dan batas penargetan tertentu dapat mengurangi ketertutupan ini tanpa melarang kampanye menyampaikan pesan yang relevan bagi komunitas lokal.

Konsentrasi pasar turut menentukan pilihan yang tersedia. Bila hanya sedikit penyedia mengendalikan distribusi, data, komputasi, dan model bahasa, masyarakat memiliki daya tawar terbatas dalam menetapkan standar. Interoperabilitas, portabilitas data yang aman, pilihan rekomendasi, dan dukungan bagi media publik dapat memperluas alternatif. Kebijakan persaingan usaha tidak menggantikan perlindungan privasi atau hak politik, tetapi dapat mengurangi ketergantungan pada satu arsitektur komersial.

Ekonomi perhatian tidak hanya berlangsung di platform besar. Penerbit berita, kreator, konsultan politik, dan organisasi kampanye juga menghadapi insentif untuk menghasilkan konten yang memperoleh klik atau respons emosional. Karena itu, kritik yang hanya menunjuk kode rekomendasi mengabaikan rantai produksi dan distribusi yang lebih luas. Reformasi perlu mempertimbangkan

pembiayaan jurnalisme, praktik iklan, transparansi konsultan, dan kemampuan masyarakat sipil membangun saluran informasi yang tidak semata bergantung pada viralitas.

Menilai biaya sosial berarti mengukur manfaat sekaligus eksternalitas. Rekomendasi personal memudahkan orang menemukan informasi yang relevan dan komunitas yang sulit dijangkau media arus utama. Tetapi manfaat tersebut perlu dibandingkan dengan risiko manipulasi, pelecehan terarah, dan pengumpulan data berlebihan. Pilihan publik tentang desain pasar dan aturan data harus dibuat secara demokratis, berdasarkan bukti dan perdebatan terbuka, bukan hanya melalui syarat layanan yang sulit dibaca.

Mengapa hubungan sebab-akibat sulit dibuktikan

Ketika suatu unggahan viral bertepatan dengan peningkatan ketegangan politik, urutan waktu saja tidak membuktikan bahwa unggahan atau algoritma menyebabkan polarisasi. Orang yang sudah memiliki pandangan kuat mungkin lebih sering mencari dan membagikan konten partisan. Aktor politik dapat meningkatkan konflik sekaligus mengubah strategi platform. Peristiwa dunia nyata, liputan berita, ekonomi, dan interaksi langsung juga memengaruhi emosi serta sikap. Peneliti perlu membandingkan penjelasan alternatif dan menetapkan apa yang dimaksud dengan paparan, perubahan sikap, dan populasi sasaran.

Eksperimen memberi kemampuan mengisolasi sebab, tetapi hasilnya bergantung pada perlakuan yang diuji, kepatuhan peserta, durasi, serta konteks. Mengacak urutan feed selama beberapa minggu dapat menguji efek pilihan tertentu pada pengguna yang setuju berpartisipasi; hal itu tidak langsung menjawab efek bertahun-tahun atau dampak pada orang yang tidak ikut studi. Eksperimen laboratorium dapat menguji pesan secara terkendali, tetapi situasinya mungkin jauh dari percakapan politik nyata. Keduanya berguna bila batas generalisasi dijelaskan dengan jujur.

Studi observasional dapat mencakup penggunaan yang lebih alami dan waktu yang panjang, tetapi menghadapi bias seleksi dan data yang tidak lengkap. Jejak digital tidak memberi tahu apakah seseorang sungguh membaca konten, mempercayainya, atau hanya terpapar sekilas. Tindakan menyukai unggahan juga memiliki banyak makna. Menggabungkan log paparan sukarela, survei,

wawancara, eksperimen, dan data kontekstual memperkuat interpretasi, selama tiap jenis data dikumpulkan dengan perlindungan privasi yang memadai.

Metrik polarisasi juga perlu dipilih sesuai pertanyaan. Perbedaan opini kebijakan tidak sama dengan kebencian terhadap pemilih lain, dan kemarahan yang tampak di unggahan tidak selalu mewakili sikap penduduk. Sentimen otomatis dapat gagal membaca ironi, bahasa campuran, atau kosakata komunitas. Peneliti sebaiknya melaporkan ketidakpastian pengukuran dan melakukan validasi manual dengan sampel yang seimbang. Tanpa langkah itu, temuan yang tampak presisi dapat hanya mengulang bias data atau model.

Karena sebab-akibat berlapis, laporan publik idealnya menyebut tingkat kepastian: apa yang langsung ditunjukkan data, apa yang merupakan penafsiran, dan apa yang masih hipotesis. Bahasa yang terkalibrasi bukan kelemahan komunikasi. Ia membantu pembuat kebijakan menghindari reaksi yang terlalu luas pada bukti lemah, sambil tetap memungkinkan tindakan pencegahan ketika potensi kerugian tinggi dan dapat dibatasi secara proporsional.

Perlindungan hak, privasi, dan kelompok terdampak

Pertahanan terhadap disinformasi dapat berubah menjadi pengawasan jika organisasi mengumpulkan data politik warga secara luas untuk mengidentifikasi kecenderungan, jaringan pertemanan, dan sikap. Pemrosesan semacam itu memunculkan risiko kebocoran, penggunaan ulang, atau penargetan yang tidak pernah disetujui pengguna. Analisis jaringan semestinya mengikuti prinsip kebutuhan dan minimisasi data, menerapkan masa simpan yang terbatas, membatasi akses, serta memisahkan data identitas dari hasil penelitian jika memungkinkan.

Moderasi otomatis menimbulkan masalah hak yang berbeda. Konten kritik, berita, pendidikan, satire, atau dokumentasi pelanggaran dapat salah dikenali sebagai ujaran kebencian atau manipulasi. Dampak kesalahan mungkin paling berat bagi kelompok yang bahasa dan konteksnya kurang terwakili pada data pelatihan. Kebijakan moderasi harus menyediakan penjelasan tentang aturan yang diterapkan, jalur banding yang dapat diakses, dan peninjauan manusia untuk perkara yang berisiko tinggi. Transparansi tingkat kesalahan menurut bahasa dan jenis konten membantu mengidentifikasi ketimpangan.

Kelompok yang menjadi sasaran pelecehan politik memerlukan dukungan yang praktis: alat pelaporan yang cepat, dokumentasi ancaman, kendali atas penyebaran ulang, dan jalur bantuan yang aman. Upaya ini bukan alasan untuk meniadakan kritik keras atau debat tentang pejabat publik. Pembedaan antara kritik, pelecehan, ancaman, doxing, dan koordinasi intimidasi harus dibuat dengan kriteria yang dapat dipahami. Kebijakan yang jelas melindungi kebebasan politik sekaligus mencegah serangan yang bertujuan mengusir orang dari ruang publik.

Aksesibilitas merupakan bagian dari hak politik. Informasi resmi dan koreksi perlu tersedia dalam format yang dapat digunakan pembaca layar, diberi takarir, memiliki bahasa yang sederhana, dan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Kualitas terjemahan AI perlu diperiksa karena kesalahan kecil dalam syarat pemilu atau kebijakan publik bisa menimbulkan konsekuensi besar. Teknologi dapat membantu memperluas akses, tetapi pemeriksaan manusia dan saluran umpan balik harus tetap tersedia.

Aturan yang efektif melindungi kebebasan berpendapat dan hak untuk memperoleh informasi dengan prinsip yang konsisten. Pembatasan seharusnya memiliki dasar yang jelas, proses yang adil, alasan yang dapat diperiksa, dan pemulihan bila terjadi kesalahan. Keselamatan informasi publik tidak dapat dicapai melalui perluasan definisi disinformasi hingga mencakup semua kritik atau klaim yang tidak disukai penguasa. Sistem demokratis harus mengendalikan penyalahgunaan oleh aktor komersial maupun pemerintah.

Jurnalisme, pemeriksa fakta, dan arsitektur koreksi

Jurnalisme berfungsi sebagai infrastruktur verifikasi karena mengumpulkan bukti, memeriksa klaim, dan menjelaskan kepentingan yang berhadapan. Dalam lingkungan yang penuh konten sintetis, nilai laporan terletak pada proses yang dapat dilacak: siapa sumbernya, bagaimana bukti dikonfirmasi, apa yang belum diketahui, dan bagaimana koreksi dibuat. Berita yang cepat tetapi tidak transparan tentang sumber dapat memperbesar kebingungan. Redaksi perlu menerapkan dokumentasi asal materi, verifikasi visual, dan prosedur koreksi yang terlihat.

Pemeriksa fakta dapat membantu menjawab klaim spesifik, tetapi kapasitas mereka tidak sebanding dengan jumlah pesan dan kanal. Pemilihan klaim harus transparan agar tidak tampak partisan; metodologi dan bukti perlu dapat diakses, termasuk konteks ketika klaim sebagian benar atau belum dapat dibuktikan.

Kemitraan antara pemeriksa fakta, media lokal, dan komunitas ahli memperluas jangkauan, tetapi tidak seharusnya menjadikan platform sebagai satu-satunya penentu kebenaran. Kebijakan distribusi harus menyediakan ruang bagi sumber yang beragam dan independen.

Koreksi yang baik mempertahankan fakta yang tepat sambil menjelaskan bagian yang keliru dan sebab kekeliruannya. Mengulang klaim palsu tanpa konteks dapat memperkuat ingatan akan klaim itu, sehingga penjelasan perlu menempatkan fakta utama terlebih dahulu dan menghubungkan pembaca dengan bukti primer. Koreksi juga harus menjangkau audiens yang menerima informasi awal, bukan hanya orang yang telah mengikuti media yang sama. Ini memerlukan distribusi yang dirancang, termasuk materi singkat yang dapat dibagikan dan tautan menuju rincian.

Redaksi sebaiknya menghindari perlombaan untuk membantah setiap rumor yang tidak memiliki jangkauan. Respons yang tidak proporsional dapat memperkenalkan klaim kepada khalayak baru dan memberi perhatian yang dicari pelaku. Keputusan tentang kapan merespons perlu mempertimbangkan seberapa luas klaim tersebar, potensi bahaya, keterlibatan figur publik, dan tersedianya informasi benar yang dapat menggantikan rumor. Pemantauan bukan berarti harus mengulang atau mengarsipkan secara terbuka informasi berbahaya tanpa kendali.

Keberlanjutan jurnalisme bermutu membutuhkan model pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada klik dan viralitas. Langganan, dukungan publik yang independen, hibah transparan, dan kemitraan dapat membantu, asalkan tidak mengurangi otonomi redaksi. Platform dapat memberi kompensasi atas penggunaan karya berita dan menyediakan akses data yang adil. Demokrasi memerlukan lebih dari sekadar koreksi setelah rumor beredar; ia memerlukan pelaporan lokal rutin yang memungkinkan publik memahami keputusan dan mengawasi kekuasaan.

Tata kelola algoritma sebagai persoalan demokratis

Tata kelola algoritma tidak cukup dipahami sebagai pemeriksaan perangkat lunak. Ia menyangkut siapa yang menentukan tujuan sistem, data apa yang digunakan, kelompok mana yang menanggung kesalahan, serta jalur apa yang tersedia untuk

menggugat keputusan. Dalam konteks politik, sebuah rekomendasi dapat mengubah apa yang tampak penting, sementara keputusan moderasi dapat memengaruhi siapa yang dapat berbicara dan menjangkau publik. Karena dampak ini menyentuh kebebasan berekspresi dan kesetaraan politik, evaluasi perlu menggabungkan keahlian teknis, hukum, ilmu sosial, jurnalisme, dan pengalaman warga.

Prinsip pertama adalah proporsionalitas. Sistem yang mengurutkan video hiburan tidak otomatis mempunyai risiko sama dengan sistem yang menargetkan iklan politik, mengidentifikasi pemilih, atau memutus kelayakan bantuan sosial. Tata kelola berbasis risiko memetakan tujuan, skala jangkauan, potensi dampak, kerentanan pengguna, dan kemungkinan banding. Langkah pengamanan dapat mencakup penilaian dampak sebelum peluncuran, pengujian dalam bahasa dan konteks lokal, pemantauan selama operasi, serta evaluasi setelah pemilu. Prinsip ini mencegah kebijakan generik yang mahal tetapi tidak menyentuh mekanisme berbahaya.

Prinsip kedua ialah akuntabilitas sepanjang siklus hidup sistem. Pengembang model, platform, pengiklan, penyedia data, konsultan kampanye, dan lembaga publik memiliki peran yang berbeda. Tanggung jawab tidak seharusnya larut dalam rantai kontrak. Catatan perubahan model, sumber data, sasaran optimasi, dan insiden perlu disimpan dengan perlindungan keamanan yang wajar. Bila terjadi kesalahan, harus diketahui siapa yang dapat menghentikan distribusi, memperbaiki informasi, memberi pemulihan kepada pihak terdampak, dan menjelaskan keputusan dalam bahasa yang dapat dipahami.

Prinsip ketiga adalah keterlibatan publik yang bermakna. Konsultasi tidak boleh hanya menjadi formalitas setelah sistem diputuskan. Organisasi masyarakat sipil, kelompok minoritas, pemantau pemilu, jurnalis, akademisi, dan penyandang disabilitas dapat membantu mengidentifikasi dampak yang luput dari data teknis. Keterlibatan itu perlu disertai akses informasi dan mekanisme tanggapan: masukan mana yang diadopsi, mana yang tidak, dan alasannya. Dengan demikian, legitimasi tidak bergantung pada klaim bahwa sistem objektif, melainkan pada prosedur yang terbuka untuk diperiksa dan dikoreksi.

Tata kelola juga perlu menolak dua ekstrem. Larangan menyeluruh atas penggunaan AI politik dapat menutup pemanfaatan yang berguna, seperti terjemahan aksesibel, ringkasan program, atau pemantauan ancaman terhadap

petugas pemilu. Sebaliknya, pembiaran dengan alasan inovasi akan menyerahkan keputusan publik kepada kepentingan komersial atau partisan. Pendekatan demokratis membedakan penggunaan, tingkat risiko, dan konteks, lalu menetapkan kewajiban yang dapat ditegakkan. Sasaran akhirnya adalah membatasi praktik manipulatif sambil mempertahankan ruang eksperimen, kritik, dan persaingan politik yang adil.

Transparansi, audit, dan akses riset

Transparansi yang berguna menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan apa akibatnya, bukan sekadar menerbitkan dokumen teknis yang tidak dapat ditafsirkan. Platform dapat menjelaskan tujuan utama sistem rekomendasi, jenis sinyal yang memengaruhi pemeringkatan, pilihan kendali pengguna, serta perubahan besar yang terjadi. Penjelasan perlu membedakan distribusi berbayar dari rekomendasi organik, konten yang diturunkan jangkauannya dari yang dihapus, dan hasil otomatis dari keputusan manusia. Detail tertentu mungkin perlu dibatasi untuk mencegah manipulasi sistem, tetapi kerahasiaan dagang tidak semestinya menutup seluruh pemeriksaan dampak publik.

Audit independen menilai apakah sistem bekerja sesuai tujuan dan apakah ada dampak yang tidak seimbang. Audit harus memeriksa lebih dari akurasi rata-rata: bahasa daerah, kelompok demografis, pola konten politik, tingkat kesalahan moderasi, serta konsistensi jalur banding. Auditor memerlukan mandat yang jelas, kompetensi, perlindungan dari konflik kepentingan, dan akses yang sesuai dengan risiko. Hasilnya sebaiknya diterbitkan sebagai temuan yang dapat ditindaklanjuti, termasuk metodologi dan batasan. Audit satu kali bukan jaminan; sistem berubah, sehingga pengawasan berkala dan pemicu evaluasi ulang perlu ditentukan.

Peneliti independen dapat menemukan pola koordinasi, perubahan paparan, atau kerentanan yang tidak terlihat dari laporan platform. Akses data, bagaimanapun, harus menjaga privasi, keamanan, dan keselamatan peneliti. Desain yang baik dapat menggunakan data teragregasi, lingkungan analisis terkendali, peninjauan etis, pembatasan ekspor data pribadi, serta proses permintaan yang adil. Persyaratan tidak boleh begitu rumit sehingga hanya perusahaan besar atau lembaga tertentu yang mampu meneliti. Akses perlu mencakup pakar lokal, termasuk yang memahami konteks bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah.

Basis data iklan politik merupakan contoh transparansi yang langsung dapat digunakan publik. Arsip yang memadai menampilkan sponsor, rentang belanja, periode tayang, sasaran audiens pada tingkat yang aman, variasi kreatif, dan perubahan materi. Jika iklan menggunakan konten sintetis atau segmentasi sensitif, penandaan dan pengungkapan harus jelas. Arsip ini membantu jurnalis dan pemantau melihat apakah kelompok berbeda menerima klaim yang bertentangan. Transparansi iklan juga perlu disertai aturan tentang verifikasi identitas sponsor dan larangan menyamarkan pembiayaan melalui perantara.

Pengukuran dampak memerlukan indikator yang beragam, bukan satu angka engagement. Metrik yang relevan meliputi jangkauan konten yang telah dikoreksi, kecepatan penghapusan jaringan palsu, mutu penanganan laporan, tingkat keberhasilan banding, proporsi rekomendasi politik, paparan lintas pandangan, dan kepercayaan pengguna. Tidak semua indikator dapat dipublikasikan secara real time; sebagian dapat dilaporkan dalam agregat atau setelah risiko keamanan dikendalikan. Prinsipnya ialah membuat keputusan platform dapat ditelaah tanpa menciptakan peta operasional yang membantu pelaku menghindari deteksi.

Pengamanan khusus untuk pemilu

Pemilu memerlukan kesiapan yang dibangun sebelum masa kampanye. Komisi pemilihan, regulator, partai, media, dan platform dapat menyepakati titik kontak, prosedur eskalasi, definisi kejadian kritis, serta protokol koreksi informasi. Simulasi pra-pemilu membantu menguji respons terhadap situs tiruan, rekaman kandidat palsu, klaim tentang perubahan jadwal, atau gangguan pada layanan resmi. Prosedur tersebut harus melindungi independensi lembaga pemilu dan tidak menjadikan kritik terhadap penyelenggara sebagai kategori disinformasi secara otomatis.

Informasi pemilu yang autentik harus mudah ditemukan dan mudah dikenali. Situs dan kanal resmi perlu konsisten, aman, aksesibel, serta tersedia dalam bahasa yang dipakai masyarakat. Pengumuman penting sebaiknya disebarkan melalui beberapa kanal dan dilengkapi arsip yang dapat dirujuk. Jika suatu klaim palsu beredar, tanggapan institusi idealnya menyebut bukti, sumber, waktu, dan cara memeriksa kembali; penghapusan konten saja tidak selalu menjawab kebingungan. Ketahanan informasi bergantung pada mutu komunikasi sehari-hari, bukan hanya reaksi pada hari pemungutan suara.

Kebijakan politik digital harus memperhatikan ketimpangan daya. Kandidat dengan sumber daya besar dapat membeli produksi konten dan analisis audiens yang lebih canggih, sedangkan kandidat lokal atau kelompok warga mungkin memiliki kapasitas terbatas untuk mengoreksi serangan. Aturan keterbukaan pembiayaan, batas penggunaan data sensitif, dan akses yang setara terhadap informasi resmi dapat mengurangi sebagian kesenjangan. Pemantauan perlu melihat apakah serangan terarah mengenai perempuan, kelompok minoritas, atau jurnalis yang berperan dalam pengawasan, sambil tidak menganggap kelompok itu sekadar objek perlindungan.

Penggunaan AI oleh kampanye memerlukan standar pengungkapan yang proporsional. Konten sintetis yang berpotensi disangka rekaman autentik—misalnya suara atau video kandidat—patut diberi label yang mudah dipahami dan disertai konteks. Label teknis yang tersembunyi di metadata sering tidak cukup bagi penonton yang melihat ulang potongan video di aplikasi pesan. Pada saat yang sama, satir, parodi, ilustrasi, dan eksperimen artistik tidak boleh diperlakukan sama dengan pemalsuan yang bertujuan menipu. Aturan harus menguji konteks, niat, kemungkinan menimbulkan kerugian, dan cara koreksi.

Rencana pemilu juga membutuhkan mekanisme pemulihan. Jika konten palsu tentang lokasi, waktu, atau syarat memilih menimbulkan kebingungan, lembaga pemilu harus mampu menyebarkan klarifikasi dengan cepat dan mendokumentasikan tindakan yang dilakukan. Jika akun atau konten sah salah dihapus, banding harus ditangani segera karena keterlambatan selama kampanye dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Protokol independen, pencatatan keputusan, dan laporan pascapemilu membantu membedakan gangguan nyata dari klaim partisan serta meningkatkan kesiapan untuk siklus berikutnya.

Literasi publik dan ketahanan terhadap manipulasi

Literasi digital yang efektif melampaui nasihat agar orang tidak mudah percaya. Warga perlu memahami cara mengecek sumber, tanggal, konteks, gambar, serta klaim yang memakai angka. Mereka juga perlu mengenali teknik persuasi: urgensi buatan, seruan identitas, potongan bukti, tiruan otoritas, dan permintaan untuk segera meneruskan. Pembelajaran dapat memakai latihan singkat dan contoh

lokal yang aman, kemudian memberi kesempatan mengulang pemeriksaan. Tujuannya bukan menumbuhkan kecurigaan terhadap semua informasi, tetapi membangun kebiasaan berhenti sejenak ketika klaim politik sangat emosional atau meminta tindakan segera.

Pendidikan tentang AI perlu menjelaskan baik kemampuan maupun keterbatasannya. Model generatif dapat menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang tampak meyakinkan, tetapi keluaran itu tidak otomatis benar dan tidak selalu memiliki sumber yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, keberadaan AI juga tidak membuktikan bahwa suatu rekaman palsu. Warga dapat memeriksa asal konten, membandingkan sumber independen, mencari pernyataan asli, dan menunggu konfirmasi ketika informasi belum jelas. Pendekatan ini mengurangi dua risiko sekaligus: tertipu oleh konten sintetis dan menolak bukti autentik dengan alasan bahwa semuanya bisa dibuat AI.

Keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan ruang redaksi dapat bekerja sama tanpa menjadikan pendidikan literasi sebagai kampanye partisan. Materi sebaiknya mengajarkan prosedur umum yang berlaku bagi semua kubu, menggunakan bahasa sederhana, dan menghormati perbedaan usia serta aksesibilitas. Pelatihan bagi guru dan pustakawan membantu menjaga keberlanjutan program. Evaluasi perlu mengukur keterampilan pemeriksaan dan kemampuan mengenali ketidakpastian, bukan hanya jumlah peserta atau pengakuan bahwa mereka merasa lebih cakap.

Perancang platform juga dapat membangun jeda yang mendukung keputusan lebih baik. Prompt untuk membaca artikel sebelum membagikan, peringatan tentang sumber yang tidak dikenal, konteks pada unggahan yang sedang diperdebatkan, serta pilihan mengatur rekomendasi dapat mengurangi tindakan impulsif. Efek fitur harus diuji untuk melihat apakah ia benar-benar membantu atau justru menjadi gangguan yang diabaikan. Pengguna harus dapat memahami mengapa peringatan muncul dan bagaimana mengajukan koreksi. Desain yang mendukung akurasi seharusnya memperkuat penilaian manusia, bukan memindahkan seluruh tanggung jawab kepada individu.

Ketahanan juga dibentuk oleh kualitas institusi dan layanan publik. Jika informasi resmi lambat, sulit dimengerti, atau tidak konsisten, rumor memperoleh ruang karena memenuhi kebutuhan penjelasan. Lembaga yang mau mengakui ketidakpastian, memperbaiki kesalahan, dan memperlihatkan bukti akan lebih

mungkin memperoleh kepercayaan yang tahan uji. Strategi literasi karena itu perlu beriringan dengan transparansi pemerintahan, akses pada data publik, jurnalisme independen, dan prosedur pengaduan yang responsif. Warga tidak dapat diminta memeriksa sendiri setiap klaim bila institusi yang berwenang tidak menyediakan sumber yang dapat diperiksa.

Agenda riset untuk konteks Indonesia

Riset Indonesia perlu bergerak dari inventarisasi contoh viral menuju pengujian mekanisme. Peneliti dapat mengukur jenis konten yang direkomendasikan pada akun dan kondisi yang berbeda, lalu menghubungkan pengukuran paparan dengan sikap tanpa mengklaim sebab-akibat dari korelasi sederhana. Survei panel, eksperimen yang etis, audit sistem, analisis jaringan, wawancara, dan observasi ruang percakapan dapat saling melengkapi. Sampel perlu mencakup wilayah di luar kota besar serta kelompok dengan variasi usia, pendidikan, konektivitas, dan bahasa, agar pola nasional tidak hanya mencerminkan pengguna paling aktif.

Bahasa dan konteks lokal harus menjadi objek penelitian inti. Sistem deteksi yang diuji pada bahasa Indonesia formal dapat memiliki kinerja berbeda pada campuran bahasa, dialek, singkatan, humor, dan istilah politik lokal. Peneliti perlu mendokumentasikan kesalahan positif dan negatif serta akibatnya terhadap kelompok yang berbeda. Korpus penelitian harus dibangun dengan persetujuan dan perlindungan privasi yang sesuai. Kolaborasi dengan komunitas bahasa daerah dan jurnalis lokal dapat membantu membaca ironi, rujukan sejarah, atau sindiran yang tidak terlihat dari model statistik.

Pemilu memberi kesempatan untuk mempelajari perubahan dari waktu ke waktu, tetapi desain penelitian harus membedakan periode kampanye, peristiwa politik besar, dan siklus berita rutin. Data unggahan publik tidak mewakili seluruh percakapan: grup tertutup, layanan pesan, televisi, radio, pertemuan komunitas, dan percakapan langsung juga penting. Untuk melindungi privasi, penelitian tidak harus mengumpulkan pesan privat. Metode agregat, panel sukarela, dan wawancara dapat menjawab sebagian pertanyaan tanpa mengawasi warga secara berlebihan.

Agenda lain ialah meneliti proses koreksi dan rekonsiliasi. Kapan koreksi dipercaya oleh orang yang berbeda pilihan politik? Apakah penjelasan dari sumber lokal lebih efektif daripada pernyataan institusi nasional? Bagaimana paparan terhadap lawan politik memengaruhi rasa ingin tahu, kemarahan, atau kesediaan bekerja sama? Pertanyaan ini tidak menganggap bahwa paparan lintas pandangan selalu baik; kualitas interaksi, ketimpangan kuasa, dan norma komunitas mungkin lebih menentukan daripada keberagaman semata. Hasilnya dapat membantu merancang intervensi yang mengurangi permusuhan tanpa meniadakan perdebatan substantif.

Agar riset berdampak, diperlukan infrastruktur kolaborasi dan standar pelaporan. Universitas, lembaga pemilu, organisasi media, masyarakat sipil, dan perusahaan dapat menyepakati protokol akses aman, pelaporan insiden, dan definisi indikator yang konsisten. Data yang digunakan dan keterbatasannya perlu dijelaskan sehingga temuan dapat direplikasi tanpa membahayakan individu. Dukungan pendanaan jangka panjang penting karena penelitian satu musim pemilu tidak mampu menangkap perubahan norma dan teknologi. Pengetahuan lokal yang terkumpul secara kumulatif akan memberi dasar kebijakan yang lebih kuat daripada menyalin solusi dari negara dengan struktur politik berbeda.

Kerangka aksi bertahap bagi pemangku kepentingan

Langkah pertama adalah pemetaan risiko sebelum sistem atau kampanye dijalankan. Pengelola perlu menuliskan tujuan, sumber data, kelompok yang mungkin terdampak, jalur distribusi, risiko penyalahgunaan, serta cara menghentikan atau memperbaiki operasi. Untuk platform, pemetaan dapat menilai rekomendasi politik, iklan, moderasi, dan sistem deteksi jaringan terkoordinasi. Untuk lembaga publik, perhatian diarahkan pada keputusan yang berdampak pada hak warga dan penggunaan data pribadi. Catatan ini harus diperbarui ketika model, kebijakan, atau konteks berubah.

Langkah kedua adalah pengamanan yang dapat diuji: verifikasi sponsor iklan, pembatasan penargetan sensitif, pelabelan konten sintetis berisiko, jalur laporan yang mudah, dukungan bahasa, dan proses banding yang cepat. Setiap pengamanan memiliki trade-off. Label yang keliru dapat merusak reputasi, deteksi otomatis dapat salah menandai satire, dan keterbukaan data dapat mengancam privasi. Karena itu, mekanisme perlu diuji pada skenario nyata, disertai pencatatan tingkat kesalahan, dan dapat disesuaikan oleh pemeriksa independen.

Langkah ketiga ialah respons insiden yang terkoordinasi namun menjaga peran masing-masing pihak. Platform dapat menangani jaringan palsu dan pelanggaran kebijakan; lembaga pemilu memastikan informasi prosedural; media memverifikasi dan menjelaskan; penegak hukum menyelidiki tindak pidana sesuai proses hukum; masyarakat sipil mengawasi hak dan dampak. Koordinasi tidak berarti satu pusat komando yang mengendalikan ucapan politik. Harus ada aturan tentang bukti, dokumentasi, batas waktu, perlindungan sumber, dan publikasi alasan tindakan.

Langkah keempat adalah evaluasi pasca-insiden atau pasca-pemilu. Tinjauan perlu menjawab apa yang terjadi, siapa yang terdampak, mekanisme mana yang gagal, apakah tanggapan proporsional, dan perbaikan apa yang harus dilakukan. Ringkasan publik membantu warga menilai klaim keberhasilan dan memberi tekanan agar rekomendasi ditindaklanjuti. Evaluasi independen lebih kuat ketika penilai memperoleh akses cukup, metodologi diumumkan, serta pihak yang dinilai dapat menanggapi tanpa menghapus kritik.

Akhirnya, ukuran keberhasilan seharusnya demokratis. Bukan sekadar jumlah unggahan yang dihapus atau kecepatan model menemukan konten, tetapi apakah pemilih memperoleh informasi yang dapat dipercaya, apakah warga dapat menyampaikan pandangan tanpa intimidasi, apakah keputusan dapat digugat, dan apakah lawan politik masih diakui sebagai bagian sah dari komunitas. Indikator ini sulit diringkas menjadi satu skor, tetapi justru membantu mencegah optimasi teknis yang mengorbankan hak. Demokrasi yang sehat memerlukan kapasitas mengelola konflik secara terbuka dan memperbaiki kesalahan secara adil.

Kesimpulan: mengelola pengaruh tanpa menutup ruang demokrasi

Algoritma, disinformasi, dan polarisasi saling berkaitan melalui mekanisme yang beragam. Sistem rekomendasi mengatur keterlihatan; model bisnis dapat memberi insentif pada perhatian; aktor politik dan jaringan distribusi menghasilkan atau mengemas narasi; pengguna menafsirkan pesan melalui identitas serta pengalaman; institusi dan media memberi atau kehilangan kredibilitas. AI generatif mengubah biaya, kecepatan, dan skala produksi konten, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa konten akan dipercaya,

disebarkan, atau mengubah pilihan politik. Analisis yang baik menelusuri mata rantai ini dan menguji bukti pada konteks tertentu.

Bukti empiris mengingatkan bahwa kekhawatiran demokratis perlu disertai ketelitian. Sebagian studi menemukan pola ruang gema atau dampak paparan tertentu, sementara penelitian lain memperlihatkan efek yang terbatas atau berbeda menurut platform dan populasi. Eksperimen feed selama kampanye Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan paparan dan penggunaan tidak otomatis mengubah beberapa hasil politik yang diukur selama periode penelitian. Temuan tersebut tidak membuktikan ketiadaan risiko; ia menunjukkan pentingnya membatasi kesimpulan pada desain, rentang waktu, dan populasi yang benar-benar diteliti.

Dalam konteks Indonesia, pluralitas bahasa dan identitas, ketimpangan akses, kompetisi politik, serta peran layanan pesan menuntut riset dan kebijakan yang berakar pada situasi lokal. Dokumentasi tentang disinformasi pemilu memberi petunjuk mengenai tema dan praktik, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran efek kausal algoritma di seluruh masyarakat. Institusi publik, penyelenggara pemilu, platform, media, kampus, dan komunitas perlu membangun data serta prosedur koreksi yang dapat dipercaya tanpa mengawasi percakapan warga secara berlebihan.

Agenda yang paling menjanjikan menggabungkan transparansi yang dapat digunakan, audit independen, akses riset aman, moderasi dengan alasan dan banding, pengungkapan iklan politik, literasi, jurnalisme berkualitas, dan perlindungan hak. Kebijakan harus proporsional terhadap risiko dan terbuka untuk evaluasi. Ia perlu membedakan kebohongan yang disengaja dari kesalahan, kritik dari manipulasi, dan konflik politik yang sah dari kampanye untuk menghilangkan hak bicara atau keselamatan lawan.

Masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh teknologi saja. Ia dibentuk oleh pilihan tentang siapa yang boleh mengatur distribusi informasi, bagaimana pengaruh dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah warga mempunyai sarana untuk memperoleh serta menguji klaim bersama. Tujuan tata kelola bukan menjanjikan ruang publik tanpa konflik—tujuan seperti itu tidak realistis dan dapat menjadi dalih pembatasan—melainkan membuat konflik tetap terbuka, berbasis bukti, dan dapat diperbaiki. Dengan menempatkan manusia, hak, serta

institusi demokratis sebagai ukuran, masyarakat dapat memanfaatkan AI sambil menahan penggunaannya untuk manipulasi dan pemusatan kuasa.

Glossarium

Algoritma rekomendasi — Prosedur yang memeringkat atau menyarankan konten berdasarkan sinyal dari konten, jaringan, konteks, dan aktivitas pengguna.

Amplifikasi algoritmik — Perubahan jangkauan atau visibilitas konten yang timbul dari pemeringkatan, rekomendasi, atau sistem distribusi otomatis.

Disinformasi — Informasi salah atau menyesatkan yang dibuat atau disebarkan dengan maksud menipu.

Misinformasi — Informasi keliru yang dibagikan tanpa bukti bahwa penyebarnya bermaksud menipu.

Malinformasi — Informasi benar yang digunakan atau disebarkan dalam konteks untuk merugikan pihak tertentu.

Polarisasi ideologis — Peningkatan jarak antara posisi politik atau kebijakan yang dipegang kelompok-kelompok.

Polarisasi afektif — Meningkatnya ketidaksukaan, kecurigaan, atau permusuhan terhadap kelompok politik lain.

Polarisasi perseptual — Keyakinan bahwa kelompok lain lebih ekstrem atau lebih berbeda daripada posisi sebenarnya.

Ruang gema — Lingkungan komunikasi yang memperkuat pandangan sekelompok orang dan membatasi paparan atau tanggapan silang.

Gelembung filter — Keadaan ketika personalisasi secara konsisten membatasi keragaman informasi yang diterima seseorang.

Selective exposure — Kecenderungan memilih informasi yang sesuai dengan minat atau keyakinan yang telah dimiliki.

Propaganda komputasional — Penggunaan otomatisasi, algoritma, data, dan kurasi manusia untuk memengaruhi percakapan publik secara terencana.

Bot sosial — Akun yang sebagian atau seluruh aktivitasnya dijalankan secara otomatis untuk berinteraksi di platform sosial.

Koordinasi tidak autentik — Aktivitas akun yang tampak sebagai dukungan organik, tetapi dikoordinasikan untuk menyamarkan sumber atau skala pengaruh.

AI generatif — Sistem AI yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, atau bentuk konten baru berdasarkan pola yang dipelajari.

Deepfake — Media sintetis atau manipulatif yang meniru rupa, suara, atau gerak seseorang atau peristiwa nyata.

Microtargeting politik — Penyampaian pesan politik kepada segmen audiens sempit berdasarkan data atau inferensi karakteristik tertentu.

Affordance platform — Kemungkinan tindakan dan interaksi yang disediakan oleh desain platform, seperti berbagi, menyukai, mengutip, atau meneruskan pesan.

Integritas informasi — Kondisi ketika warga dapat mengakses, memeriksa, dan menggunakan informasi yang cukup dapat dipercaya untuk mengambil keputusan.

Literasi algoritmik — Kemampuan memahami bagaimana sistem otomatis menyusun dan memoderasi informasi serta mempertanyakan dampaknya.

Akuntabilitas platform — Kewajiban platform menjelaskan keputusan, menanggapi pengaduan, mengungkap dampak, dan memperbaiki kesalahan sistem.

Persepsi konsensus palsu — Kesan bahwa suatu pandangan lebih dominan atau diterima luas karena aktivitas koordinasi atau pola distribusi yang direkayasa.

Ketahanan demokratis — Kemampuan institusi dan masyarakat menghadapi gangguan informasi sambil menjaga hak, pluralisme, serta proses koreksi.

Prebunking — Pendidikan preventif yang membantu orang mengenali teknik manipulasi sebelum terpapar contoh tertentu.

Liar's dividend — Keuntungan yang diperoleh ketika seseorang menyangkal bukti autentik dengan mengklaimnya sebagai hasil manipulasi AI.

Daftar Pustaka

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211

Areeb, Q. M., Nadeem, M., Sohail, S. S., Imam, R., Doctor, F., Himeur, Y., Hussain, A., & Amira, A. (2023). Filter bubbles in recommender systems: Fact or fallacy—A systematic review. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 13(6), e1512. https://doi.org/10.1002/widm.1512

Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), 9216–9221. https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115

Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132. https://doi.org/10.1126/science.aaa1160

Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001

Berman, R., & Katona, Z. (2020). Curation algorithms and filter bubbles in social networks. *Marketing Science*, 39(2), 296–316. https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1208

Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118

Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., Dimmery, D., Freelon, D., Gentzkow, M., González-Bailón, S., Kennedy, E., Kim, Y. M., Lazer, D., Moehler, D., Nyhan, B., Rivera, C. V., Settle, J., Thomas, D. R., ... Tucker, J. A. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, 381(6656), 398–404. https://doi.org/10.1126/science.abp9364

Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), e2025334119. https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119

Jalli, N., & Wihardja, M. M. (2024, June 25). Election integrity in the age of artificial intelligence: Lessons from Indonesia. Fulcrum. https://fulcrum.sg/article/commentaries/election-integrity-in-the-age-of-artificial-intelligence-lessons-from-indonesia/

Kelm, O., Dohle, M., & Lindner, P. (2023). How algorithmically curated online environments influence users' political polarization: Results from two experiments with panel data. *Computers in Human Behavior Reports*, 12, 100343. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100343

Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087

Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. https://doi.org/10.1126/science.aao2998

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the "post-truth" era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008

Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7, 74–101. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1

Ludwig, K., Grote, A., Iana, A., Alam, M., Paulheim, H., Sack, H., Weinhardt, C., & Müller, P. (2023). Divided by the algorithm? The (limited) effects of content- and sentiment-based news recommendation on affective, ideological, and perceived polarization. Social *Science* Computer Review, 41(6), 2188–2208. https://doi.org/10.1177/08944393221149290

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42. https://doi.org/10.1177/0002764218759576

Nyhan, B. (2020). Facts and myths about misperceptions. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 220–236. https://doi.org/10.1257/jep.34.3.22 0

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. Trends in Cognitive *Science*s, 25(5), 388–402. https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007

Reuters Institute for the Study of Journalism. (2023). Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review. University of Oxford. https://doi.org/10.60625/risj-etxj-7k60

Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: The evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*, 7, Article 1625535. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535

Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *Annual Review of Political Science*, 21, 1–40. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050916-041037

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Williams, A. R., Burke-Moore, L., Chan, R. S.-Y., Enock, F. E., Nanni, F., Sippy, T., Chung, Y.-L., Gabasova, E., Hackenburg, K., & Bright, J. (2025). Large language models can consistently generate high-quality content for election disinformation operations. *PLOS ONE*, 20(3), e0317421. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317421

Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). Automation, algorithms, and politics: Political communication, computational propaganda, and autonomous agents—Introduction. *International Journal of Communication*, 10, 4882–4890. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6298